BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 -2029



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG
Jl.P. Diponegoro No.101 (691033 Fax. 691033 Rembang 59211
e-mail : dputaru@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029** dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun, sekaligus merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Rembang sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur, penataan ruang yang terpadu, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem penyediaan air minum, pengelolaan persampahan regional, pengelolaan air limbah, penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan jasa konstruksi serta penunjang urusan pemerintah daerah. Dengan adanya dokumen ini diharapkan penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung lebih efektif, terukur, akuntabel, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan strategis yang berkembang di Kabupaten Rembang.

Renstra ini disusun melalui proses yang sistematis, partisipatif, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini juga mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta kondisi aktual infrastruktur di Kabupaten Rembang, sehingga dapat memberikan arah kebijakan yang realistis dan dapat dilaksanakan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan masukan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang

berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan demi kemajuan Kabupaten Rembang.

Akhirnya, kami berharap dokumen ini dapat digunakan sebagaimana mestinya serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah pembangunan daerah.

.

Rembang, 20 Oktober 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

MARYOSA, A.TD., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 196712111990031007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 7
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.3.1 Maksud 10
1.3.2 Tujuan 10
1.4 Sistematika Penulisan 11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 13
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 87
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan 88
2.1.6 Dukungan BMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah 90
2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 90
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 91
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 91
2.2.2 Isu Strategis 101
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 107
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 107
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 110
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran 115

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

	3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	119
BAB IV	**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	127
	4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan	127
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	304
BAB V	**PENUTUP**	309
	5.1 Kaidah Pelaksanaan	309
	5.2 Pengendalian dan Evaluasi	310
	5.3 Pedoman Transisi	312

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	4
Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia DPUTARU Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia DPUTARU Berdasarkan Golongan	18
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia DPUTARU Berdasarkan Jabatan	19
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2024	24
Tabel 2.5	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024	30
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2020-2024	58
Tabel 2.7	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024	63
Tabel 2.8	Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024	64
Tabel 2.9	Isu Strategis DPUTARU Kabupaten Rembang	102
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPUTARU Kab Rembang Tahun 2025-2030	112
Tabel 3.2	Penahapan Renstra DPUTARU	118
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra DPUTARU	120
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPUTARU	129
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	192

Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah DPUTARU Kab Rembang	300
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama DPUTARU Kab Rembang	305
Tabel 4.5	Dukungan terhadap Indikator Kinerja Daerah	305
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPUTARU Kab Rembang	307

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	6
Gambar 1.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	6
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	16
Gambar 2.2	Peta Jabatan DPUTARU Kab Rembang	23
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	128

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintahan Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Dalam RPJPD tersebut, visi jangka panjang Kabupaten Rembang adalah "Rembang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan". Rencana Pembangunan Jangka Panjang tersebut selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RPJMD, visi jangka menengah Kabupaten Rembang adalah "Mewujudkan Rembang Sejahtera". Kesesuian antara kedua visi ini terlihat dari bagaimana visi jangka menengah berperan sebagai tahap awal dalam membangun kesejahteraan masyarakat, yang kemudian akan diperkuat dengan pencapaian kemajuan dan keberlanjutan dalam visi jangka panjang. Oleh karena itu, program dan kebijakan dalam periode 2025-2029 harus dirancang untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan agar sejalan dengan visi jangka panjang menuju Tahun 2045.

Sejalan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Rembang periode 2025-2030, maka segera disusun RPJMD Kabupaten Rembang yang pada hakekatnya merupakan wujud penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Tahapan penyusunan RPJMD telah diawali dengan perumusan rancangan teknokratik RPJMD yang esesnsinya adalah penentuan isu-isu strategis, hingga dilanjutkan sampai pada tahapan penetapan RPJMD yang memuat prioritas program pembangunan daerah serta kerangka pendanaan program perangkat daerah. Secara operasional RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dalam kaitan mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode perencanaan.

Penyusunan Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka aktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dibawah koordinasi Bappeda Kabupaten Rembang.

Renstra merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan/wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Rembang setiap tahun dalam periode renstra bersangkutan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

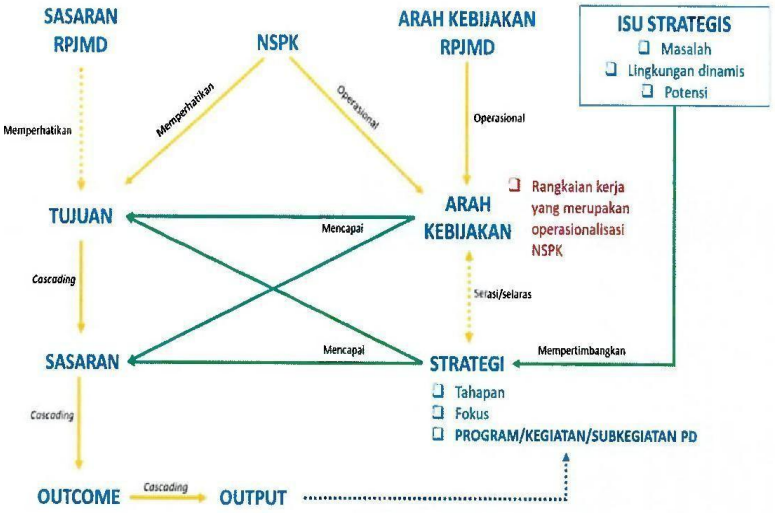
Tahapan-tahapan penyusunan Renstra disesuaikan dengan Pedoman yang termuat dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

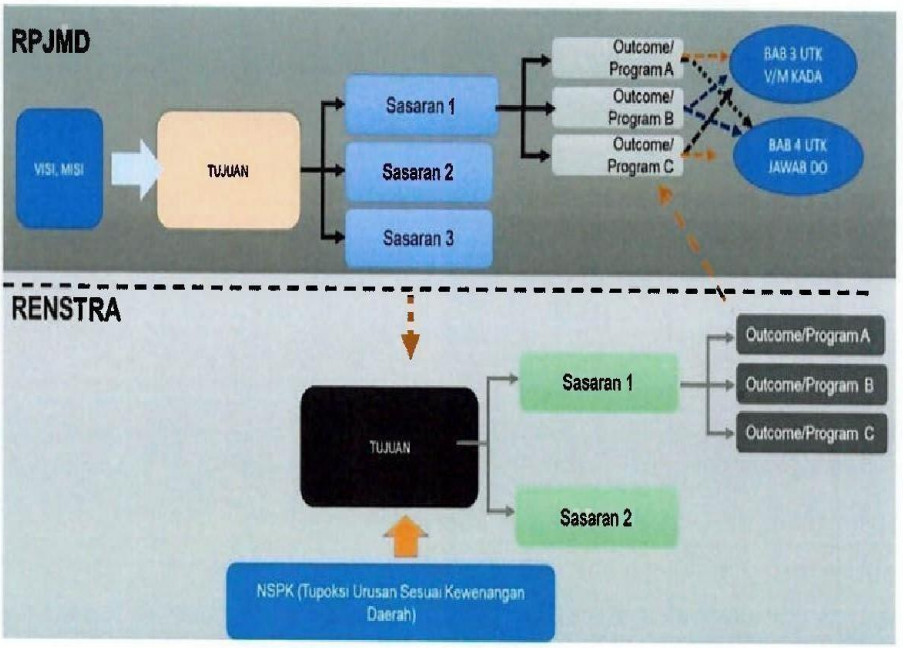
Kegiatan		Bulan ke-n							Keterangan (sejak pelantikan)
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD								
	Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra PD								
	Penyiapan Agenda Kerja								
	Penyiapan Data dan Informasi								
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD PROVINSI	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis								
	Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal)								
	Konsultasi Publik								
	Penyampaian Ranwal ke DPRD								Paling lambat 40 hari
	Pembahasan dan Kesepakatan								Dibahas dalam 10 hari kerja
	Konsultasi Ranwal ke MDN								
	Penyusunan Rancangan								
	Musrenbang								Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir)								
	Reviu APIP								Dilakukan dalam 5 hari kerja
PROSES PENETAPAN RPJMD PROVINSI	Penyampaian Ranperda kepada DPRD								Paling lambat 90 hari
	Pembahasan dengan DPRD								
	Persetujuan Bersama								Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD								Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD								Paling lambat 6 bulan
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD KAB/KOTA	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis								
	Penyusunan Ranwal								
	Konsultasi Publik								
	Penyampaian Ranwal ke DPRD								Paling lambat 40 hari
	Pembahasan dan Kesepakatan								Dibahas dalam 10 hari kerja
	Konsultasi Ranwal ke Gubernur								

Kegiatan		Bulan ke-n							Keterangan (sejak pelantikan)
	Penyusunan Rancangan								
	Musrenbang								Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rankhir								
	Reviu APIP								Dilakukan dalam 5 hari kerja
PROSES PENETAPAN RPJMD KAB/KOTA	Penyampaian Ranperda kepada DPRD								Paling lambat 90 hari
	Pembahasan dengan DPRD								
	Persetujuan Bersama								Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD								Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD								Paling lambat 6 bulan (Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik)

Gambar 1.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah (PD) digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah (DPA PD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan yang digunakan sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 207);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 178);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 2);

23. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk:

a. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dalam mewujudkan visi, misi dan program pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dalam mengkoordinasikan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dalam mewujudkan visi, misi dan program;
c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah maupun kebutuhan pihak terkait lainnya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

a. Memberikan gambaran perkembangan pelayanan perangkat daerah dalam fasilitasi fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang untuk mengindentifikasi permasalahan dan menentukan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;

b. Penguatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebagai wujud pertangungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan daerah hingga akhir periode;
c. Menetapkan program, kegiatan dan indikator kinerja berserta pendanaan indikatif pada masing-masing bagian dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;
d. Menetapkan target indikator kinerja perangkat daerah mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sebagai dasar penilaian keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun hingga akhir periode.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 ini terbagi menjadi 5 BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah
2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

2.2 Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

5.3 Pedoman Transisi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pekekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Rembang mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

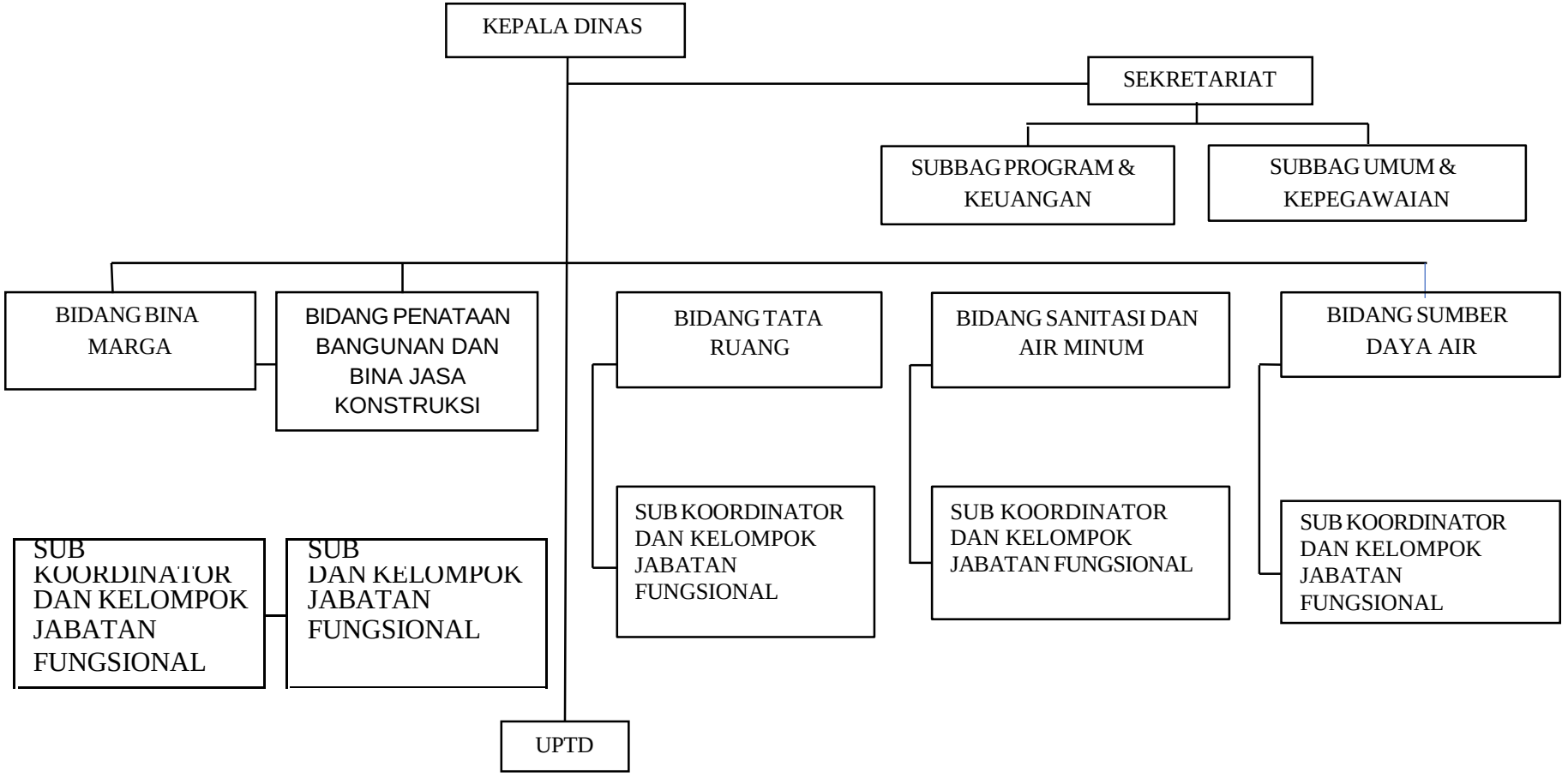
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Bina Marga
d. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
e. Bidang Tata Ruang
f. Bidang Sanitasi dan Air Minum
g. Bidang Sumber Daya Air
h. UPTD
i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Sumber: Peraturan Bupati No 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekekrjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah yang ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang maka diperlukan ketersediaan sumber daya perangkat daerah yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal.

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia DPUTARU

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	S3	-	-	-	-	-
2	S2	7	3	-	-	10
3	S1 /D4	17	10	21	8	56
4	D3	3	1	1	2	7
5	SLTA	35	1	65	4	105
6	SLTP	4	-	-	-	4
7	SD	4	-	18	1	23
TOTAL		**69**	**15**	**105**	**15**	**204**

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang 2025

Berdasarkan Tabel 2.1, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebanyak 204 orang, yang terdiri dari 84 orang PNS dan 120 orang PPPK. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang didominasi oleh lulusan SLTA, yaitu sebanyak 105 orang atau sekitar 51,47% dari total pegawai. Sebagian besar pada jenjang pendidikan menengah yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis lapangan, administrasi operasional, dan pelayanan teknis pendukung. Selanjutnya jumlah pegawai dengan pendidikan S1/D4 berjumlah 56 orang atau sekitar 27,45%. Menunjukkan bahwa telah cukup banyak tenaga dengan latar belakang

pendidikan tinggi yang dapat mendukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian, administrasi teknis, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 10 orang atau sekitar 4,90%, yang menjadi kekuatan dalam mendukung aspek manajerial, perumusan kebijakan, perencanaan strategis, serta pengembangan organisasi. Untuk jenjang pendidikan lainnya, terdapat pegawai dengan pendidikan D3 sebanyak 7 orang (3,43%), SLTP sebanyak 4 orang (1,96%), dan SD sebanyak 23 orang (11,27%).

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berdasarkan golongan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sumber Daya Manusia DPUTARU Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
	PNS			
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	26	0	26
3	Golongan III	35	15	50
4	Golongan IV	8	0	8
	P3K			
5	Golongan I	18	1	19
6	Golongan V	65	4	69
7	Golongan VII	1	1	2
8	Golongan IX	20	0	20
TOTAL		**173**	**31**	**204**

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 jumlah sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 204 orang, yang terdiri dari 84 PNS dan 120 PPPK/P3K. Komposisi pegawai PNS didominasi oleh

Golongan III sebanyak 50 orang, Golongan II sebanyak 26 orang dan Golongan IV sebanyak 8 orang menunjukkan bahwa sebagian besar PNS berada pada jenjang kepangkatan menengah dan berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis, administratif, maupun pengelolaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan pegawai PPPK didominasi oleh Golongan V sebanyak 69 orang, Golongan IX sebanyak 30 orang, Golongan I sebanyak 19 orang, dan Golongan VII sebanyak 2 orang, yang menunjukkan bahwa keberadaan PPPK sangat berperan dalam memperkuat pelaksanaan tugas operasional dan teknis. Secara keseluruhan didominasi oleh pegawai laki-laki, yaitu 173 orang, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 31 orang hal ini berkaitan dengan pekerjaan lapangan, infrastruktur, konstruksi, dan pelayanan teknis.

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia DPUTARU Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
1	Struktural				
	Kepala Dinas	14	1	0	1
	Sekretaris	12	1	0	1
	Kepala Bidang	11	5	0	5
	Kepala Sub Bagian	9	0	2	2
	Kepala UPT	9	1	0	1
2	Fungsional Umum				
	Analis Bangunan dan Perumahan	7	1	0	1
	Analis Jalan dan Jembatan	7	0	1	1
	Analis Kelembagaan	7	2	0	2
	Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	1	0	1
	Analis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	1	0	2
	Analis Perumahan	7	1	0	1
	Analis Potensi Sumber Air Tanah	7	0	1	1
	Analis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	7	1	0	1

	Analis Tata Ruang	7	0	1	1
	Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	7	1	0	1
	Penata Keuangan	7	0	1	1
	Pengawas Pengairan	7	1	0	1
	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	7	1	0	1
	Pengawas Tata Bangunan	7	1	0	1
	Penata Layanan Operasional	7	4	1	5
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	0	1	1
	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	1	0	1
	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	6	0	0	1
	Pengelola Bangunan Gedung	6	1	0	1
	Pengelola Bengkel	6	1	0	1
	Pengelola Gaji	6	1	0	1
	Pengelola Kelengkapan Jalan	6	1	0	1
	Pengelola Kepegawaian	6	0	1	1
	Pengelola Keuangan	6	2	0	2
	Pengelola Layanan Operasional	6	1	0	1
	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	1	0	1
	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	6	1	0	1
	Pengelola Peralatan	6	1	0	1
	Pengelola Sistem Manajemen Jalan	6	1	0	1
	Pengelola Sumber Daya Air	6	1	0	1
	Pengelola Umum Operasional	6	18	0	19
	Operator Alat Berat	5	10	0	10
	Operator Layanan Operasional	5	55	0	55
	Pemelihara Jalan	5	8	0	8
	Pengadministrasi Perkantoran	5	10	0	13
	Pengadministrasi Umum	5	3	0	3
	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	0	0	4
	Pengemudi	3	1	0	1

	Penjaga Pintu Air	3	6	0	6
3	Fungsional Tertentu				
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	1	0	1
	Penata Ruang Ahli Muda	9	0	2	2
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	1	0	1
	Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1	0	1
	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	2	0	2
	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	1
	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	0	1	1
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	0	1
	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	0	1
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	3	2	5
	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	1	2	3
	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Ahli Pertama	8	2	0	2
	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	8	3	1	4
	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	0	1	1
	Penata Ruang Ahli Pertama	8	3	3	6
	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	3	0	3
	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6	0	2	2
	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Pemula	5	0	1	1
TOTAL			**174**	**30**	**204**

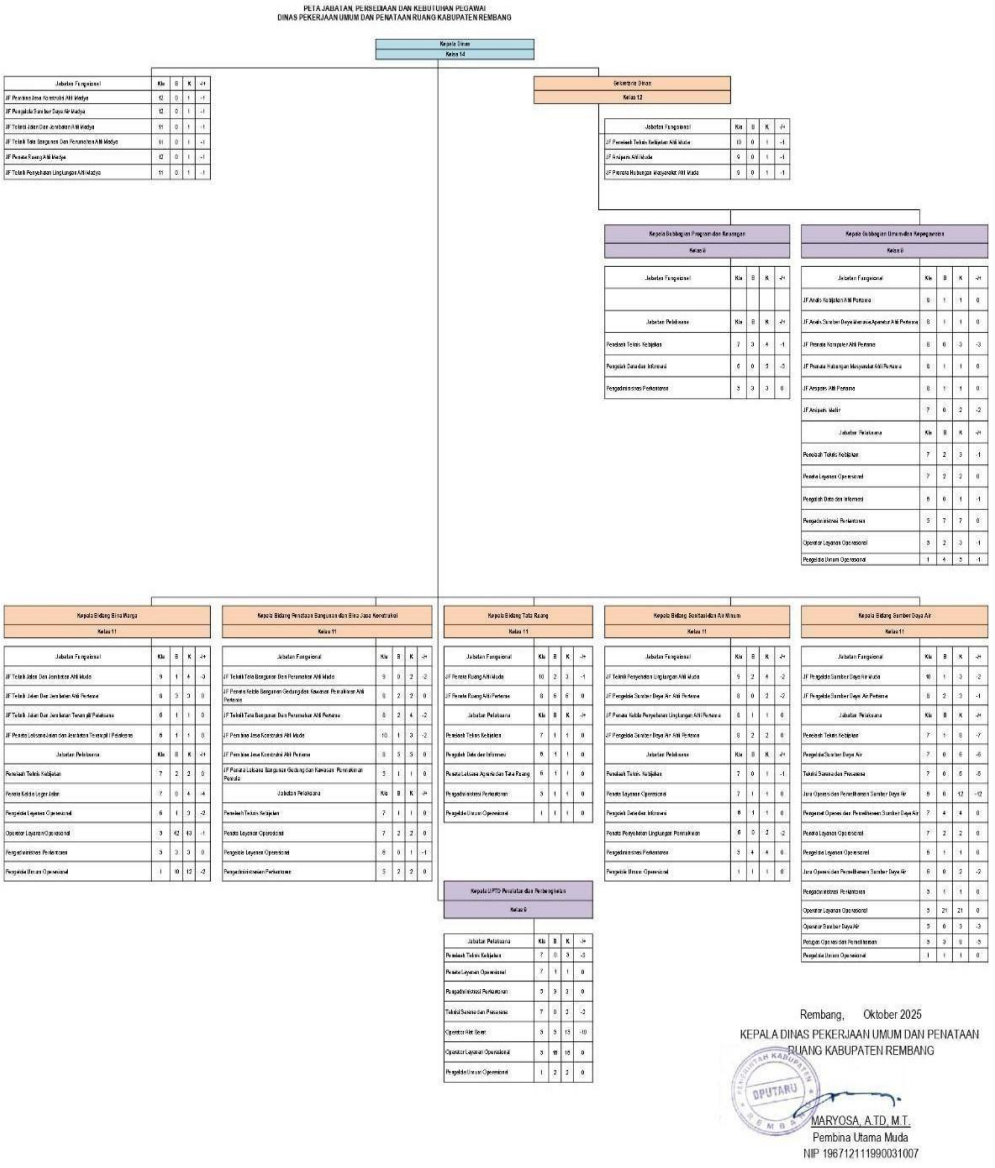
Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.3 Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa komposisi pegawai didominasi oleh jabatan fungsional umum, terutama pada posisi Operator Layanan Operasional sebanyak 55 orang, Pengelola Umum Operasional sebanyak 19 orang, Pengadministrasi Perkantoran sebanyak 13 orang, dan Operator Alat Berat sebanyak 10 orang, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai mendukung pelaksanaan tugas teknis, operasional, dan administrasi di lapangan maupun di kantor. Pegawai pada jabatan fungsional

tertentu, seperti tenaga ahli di bidang jasa konstruksi, penataan ruang, teknik jalan dan jembatan, yang berperan dalam mendukung fungsi teknis organisasi.

Gambar 2.2
Peta Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Rembang



Untuk mendukung tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi				Jumlah
			Baik	Rusak			
				Ringan	Sedang	Berat	
1	Tanah	m2	7.907.203,07				7.907.203,07
2	Bangunan/Gedung	unit	12				12
3	Jalan Kabupaten	Km	252,4	171,38	73,55	96,87	594,20
4	Jembatan	Unit	125				126
5	Waduk	Unit	6	48	30	49	133
6	Bendung	Unit	19	56	50	60	185
7	Bangunan Penguat Tebing/ Pantai	Unit	82				82
8	A.C.	unit	14		8	1	23
9	Printer	unit	21	20	1		42
10	Laptop	unit	43			14	57
11	Slide Projektor	unit	3				3
12	Buldozer	unit	1				1
13	Crawler Exchavator	unit	1				1
14	Dump Truck	unit	3				3
15	Macadam Roller/Three Wheel Roler	unit	10				10
16	Excavator PC 200	unit	1				1
17	Mesin Pemotong Rumput	unit	15				15
18	Pick Up	unit	3				3
19	Sepeda Motor Roda 3	unit	2				2
20	Vibrator Roller	unit	1				1
21	Truck + Attachment	unit	3				3
22	Track Loader	unit	2				2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi				Jumlah
			Baik	Rusak			
				Ringan	Sedang	Berat	
23	Tandam Roller	unit	8				8
24	Mobil Station Wagon	unit	5				5
25	Road Maintenance Truck	unit	1				1
26	Sepeda Motor	unit	33				33
27	Stamper	unit	1				1

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025

Berdasarkan Tabel 2.4 kondisi sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar aset berada dalam kondisi baik. Hal ini menggambarkan bahwa dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah pada dasarnya masih cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, baik dalam aspek pelayanan administrasi, kegiatan teknis lapangan, maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang selama periode perencanaan 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan meningkatnya kualitas pelayanan Infrastuktur didukung oleh penataan ruang yang terpadu Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tidak hanya ditinjau dari keberhasilan administratif dan prosedural, tetapi juga dari aspek substantif dalam menghasilkan perencanaan yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dilakukan secara terukur dan objektif melalui beberapa indikator yang mencerminkan kualitas meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur didukung oleh penataan ruang yang terpadu, indikator-indikator tersebut antara lain:

- Indeks Aksesibilitas Infrastruktur

  Indeks Aksesibilitas Infrastruktur DPUTARU Kabupaten Rembang merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemudahan masyarakat Rembang dalam mengakses sarana dan prasarana infrastruktur yang dibangun, dikelola, dan dipelihara oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

  Indeks ini menjadi tolok ukur kinerja pembangunan infrastruktur wilayah, sekaligus mencerminkan pemerataan hasil pembangunan di seluruh kecamatan/ desa di Kabupaten Rembang.

- Indeks Aksebilitas Jalan

  Indeks Aksesibilitas Jalan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kemudahan suatu wilayah untuk dijangkau atau mengakses pusat kegiatan melalui jaringan jalan yang tersedia. Semakin tinggi indeksnya, semakin mudah dan efisien masyarakat, barang, dan jasa dapat berpindah antar lokasi.

  Indeks ini menggambarkan persebaran infrastruktur jalan dan keterhubungan antar wilayah, yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam konteks pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Indeks Akses Layanan Dasar

  Indeks Akses Layanan Dasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang merupakan ukuran kinerja pelayanan infrastruktur dasar yang menggambarkan sejauh mana masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Rembang dapat mengakses kebutuhan dasar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terutama di bidang air minum, persampahan, drainase, air limbah. Indeks ini menunjukkan tingkat pemerataan, kemudahan, dan keterjangkauan layanan dasar infrastruktur fisik yang disediakan pemerintah daerah melalui program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

- Indeks Kinerja Pengelolaan SDA

  Indeks Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air adalah ukuran yang

menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah, baik dari aspek kuantitas, kualitas, konservasi, maupun pendayagunaan air.

Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang mampu mengelola air secara terpadu dan berkelanjutan, guna mendukung kebutuhan masyarakat, pertanian, industri, dan lingkungan.

- Indeks Kinerja Penyelenggaraan Ruang

  Indeks Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

  Indeks ini mencerminkan sejauh mana kebijakan tata ruang telah di implementasikan, dipatuhi, dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan wilayah yang tertib, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

  Dengan kata lain, Indeks Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang mengukur kinerja tata kelola ruang dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendaliannya.

- Indeks Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi

  Indeks Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah alat ukur untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah mengelola bangunan di wilayahnya, sementara layanan jasa konstruksi adalah keseluruhan proses dan kegiatan profesional untuk mewujudkan sebuah bangunan, mulai dari ide hingga fisik bangunan berdiri. Indeks Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah sebuah sistem penilaian yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kinerja pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam menyelenggarakan tata kelola bangunan gedung dan lingkungannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang didirikan dan dimanfaatkan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.

- Nilai SAKIP DPUTARU

  Nilai SAKIP DPUTARU adalah skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diberikan oleh

Inspektorat Daerah untuk menilai seberapa baik dinas tersebut: Merencanakan programnya, Melaksanakan kegiatan sesuai sasaran strategis, Mengukur dan melaporkan hasil kinerjanya, serta Menindaklanjuti evaluasi kinerja untuk peningkatan efektivitas pembangunan.

Dengan kata lain, nilai SAKIP menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi birokrasi DPUTARU dalam mencapai hasil pembangunan. Semakin tinggi nilai SAKIP sebuah DPUTARU, semakin baik pula instansi tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kinerjanya secara transparan dan bertanggung jawab.

- Indeks Kepuasan Masyarakat DPUTARU

  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPUTARU adalah hasil pengukuran tingkat kepuasan warga terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU). Nilai indeks ini menjadi tolok ukur untuk menilai mutu pelayanan dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Tujuan IKM adalah untuk mengukur seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, guna mendorong peningkatan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. IKM DPUTARU Kabupaten Rembang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap berbagai layanan teknis dan administratif yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR/Tata Ruang, seperti: Pelayanan izin pemanfaatan ruang / tata ruang, Pelayanan rekomendasi teknis bangunan gedung (IMB/PBG), Pelayanan rekomendasi jaringan utilitas / infrastruktur jalan, Pelayanan pengelolaan air, drainase, dan sanitasi lingkungan, Pelayanan informasi data infrastruktur dan tata ruang.

  Dengan kata lain, IKM DPUTARU menjadi cermin atas kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab Rembang.

- Indeks Manajemen Risiko DPUTARU

  Indeks Manajemen Risiko (IMR) adalah ukuran tingkat kematangan (maturity level) penerapan sistem manajemen risiko di instansi pemerintah, termasuk pada DPUTARU. Artinya IMR menunjukkan sejauh mana

DPUTARU mampu mengenali, menganalisis, menanggulangi, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan kinerja pelayanan publik.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya telah diratifikasi oleh pemerintah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra DPUTARU

Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam	%		45	50	55		18,50	38,47	52,47		41,11	76,94	95,40

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kondisi baik													
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%		45	47	55		41,1	41,18	48,42		91,33	87,62	88,04
1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan	Lembaga				0				0				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Diberdayakan													
1	03	02	2.01	0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga								0				
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi /Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM								0				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM								0				
1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit								0				
1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM			0,75	1			0,747	0,71			99,60	70,86
1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai	KM												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Lainnya yang Dibangun													
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen				1								
1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air	Dokumen												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Baku yang Disusun													
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%		42	47	55		41,1	38,47	56,53		97,86	81,85	102,78
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM			1	2,50			7,77	8,11			777,00	324,54

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung												
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM			0,2	0,50				0,41				82
1	03	02	2.02	0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	DI			5	20				20				100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen												
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	%	Na	94,19	97	99,4	Na	86,09	92,45	98,07		91,40	95,31	98,66

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	-			94,19	1000	99		91,40	2000	98,07		97,04	200,00	98,66
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen				1								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/ Detik				10				8,00				80,00
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR			1000	1.000			1000	0,00			100,00	0,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak	%	Na	92,82	95	96	Na	11,14	97,86	92,71		12,00	103,01	96,57
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	-			92,82	1000	96		92,42	189	92,71		99,57	18,90	96,57
1	03	05	2.01	003	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga				-								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit				-								
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit			1	1			1	1,00			100	100
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik	Rumah Tangga				1.000				400,00				40

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Sesuai dengan Standar													
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen													
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	%	Na	63	25	30	Na	48,66	25	85,02		77,24	100,00	283,39

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	%		20	67	77		19,28	45	85,02		96,40	67,16	110,41
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M				1000				150				15
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan	Meter			2400	2400			2400	2400			100,00	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Terpeliharа													
1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan												
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan				1000								0
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	% Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung	%	Na	100	100	100	Na	100,00	100	100		100,00	100	100
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten	% Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung	%		30	5	100		35	20	100,00		116,67	400	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung														
1	03	8	2.01	020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten /Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis				4				4				100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA),	Dokumen			1	1			1	1			100	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	% Jumlah Bantuan Teknis Penataan bangunan gedung dan lingkungannya	%	Na	25	30	30	Na	25,00	30	30		100	100	100
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di	-			100	30	1		100	30	1,00		100	100	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Daerah Kabupaten /Kota															
1	03	09	2.01	007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen				1				1				100
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pertumbuhan jalan dalam kondisi mantap	%	Na	74	77	80	Na	54,25	-11,55	71,17		73,31	-15	89
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%		74	64	80		73,32	53,89	71,17		99,08	84,20	88,96
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM			30	20			26,272	19,19			87,57	95,93

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM			0	50			13,89					
1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM			30	3			16,796				55,99	
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan			5				3				60,00	
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan												
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan				40				1,00				2,50

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM			1	1			1	594,20			100,00	59419,90
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM				20				2,55				12,73
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM			60	60			66,9	63,00			111,50	105
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pertumbuhan ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi	%	Na	5	10	10	Na	0,00	10	10			100	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah kegiatan pelatihan dan/atau sertifikasi			50	1			30	1	1,00		60		
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang								-				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Tersediannya homepage dan/atau subdomain SIPJAKI daerah termutakhir	subdomain				1				1				100
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang				1				1				100,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR	%	Na	85	90	95	Na	90,00	90	95		105,88	100	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	Penetapan RTR			1	2	1		0	1	1,00		0,00	50	100
1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten /Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen				1				1				100
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Capaian pelaksanaan kegiatan koordinasi sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	%		100	100			90	100			90,00	100,00	
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang	%		5	5	97		4	90	97		80,00	1800	100
1	03	12	2.03	004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan				7				7				100
1	03	12	2.03	006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang	%		100	100	100		100	100	100		100	100	100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Capaian Renstra PD			
								2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0 3	1 2	2 . 0 4	0 0 1 1	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen				2				2				100

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Capaian Renstra Perangkat Daerah				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15
A. Indikator Tujuan :																	
1	Indeks aksesibilitas Infrastruktur	nilai	Na	Na	58,05	61,61	66,88		Na	38,15	36,82	36,75		Na	65,72	59,76	54,95
B. Indikator Sasaran																	
1	Indeks Aksesibilitas Jalan	nilai	Na	Na	0,48	0,48	0,5		Na	0,02	0,41	0,41		Na	4,17	85,42	82,00
2	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	nilai	Na	Na	72,93	72,93	76,13		Na	52,67	73,44	76,45		Na	72,22	100,70	100,42
3	Persentase Ketersediaan Air Baku	Prosentase	Na	Na	45	45	55		Na	29,90	30,7	40,43		Na	66,44	68,22	73,51
4	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	Prosentase	Na	Na	6	6	8		Na	3,00	2	1		Na	50,00	33,33	12,50

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Capaian Renstra Perangkat Daerah				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15
5	Persentase Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Prosentase	Na	Na	47	47	48,3		Na	47,30	47,78	31,95		Na	100,64	101,66	66,15
C.IKK PERANGKAT DAERAH																	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	0	26.3	0	100	45.92	0	26.3	0	100	45.92

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Capaian Renstra Perangkat Daerah				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	0	7.95	0	100	5.35	0	7.95	0	100	5.35
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	100	100	100	100	100	78	81.4	16	38.47	34.75	78	81.4	16	38.47	34.75

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Capaian Renstra Perangkat Daerah				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	65.8	90.34	91.41	92.71	92.84	65.8	90.34	91.41	92.71	92.84
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100	100	100	100	0	100	92.42	92.51	92.71	0	100	92.42	92.51	92.71
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100	100	100	100	0	100	14.22	100	100	0	100	14.22	100	100

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Capaian Renstra Perangkat Daerah				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	71.84	84.13	74.18	70.97	71.17	71.84	84.13	74.18	70.97	71.17
8	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	100	100	100	100	0	5.56	22.22	100	3.95	0	5.56	22.22	100	3.95
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Tabel 2.7
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

No	Indikator SPM	Satuan	Target Renstra					Realisasi Renstra					Capaian Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	%	100	100	100	100	100	88,79	90,34	91,40	92,71	92,84	88,79	90,34	91,40	92,71	92,84
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah domestik	%	100	100	100	100	100	91,03	100	92,42	92,51	92,75	91,03	100	92,42	92,51	92,75

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Tabel 2.8
Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66.434.676.266	76.981.986.128	333.188.338.664	0		50.459.455.335	59.861.927.777	129.919.681.631	169.921.730.575	**61.557.303.622**	75,95				
URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	66.434.676.266	76.981.986.128	333.188.338.664			50.459.455.335	59.861.927.777	129.919.681.631	169.921.730.575	**61.557.303.622**	75,95				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66.434.676.266	76.981.986.128	333.188.338.664	0		50.459.455.335	59.861.927.777	129.919.681.631	169.921.730.575	**61.557.303.622**	75,95				
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	**3.753.012.860**					**3.335.026.579**					88,86				
Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	3.087.500.000					2.697.063.502					87,35				

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	636.512.860					624.563.077					98,12				
Peningkatan kualitassumber daya aparatur	15.000.000					2.400.000					16				
Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	14.000.000					11.000.000					78,57				
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**122.500.000**					**108.303.500**					**88,41**				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.500.000					85.700.000					89,74				
Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	27.000.000					22.603.500					83,72				
Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	**16.000.000**					**15.700.000**					98,13				
Pengelolaan keterbukaan informasi publik	16.000.000					15.700.000					98,13				

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	**52.568.210.356**					**38.516.401.941**					73,27				
Pembangunan jalan dan Jembatan	39.755.152.406					26.008.139.926					65,42				
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8.989.631.023					8.924.799.190					99,28				
Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Goron g Gorong	3.218.426.927					3.031.308.100					94,19				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	605.000.000					552.154.725					91,27				
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	**9.603.876.700**					**8.117.906.710**					**84,53**				

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembangunan Sumber Daya Air	3.006.475.000					2.941.574.000					97,84				
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	6.361.345.000					5.042.047.010					79,26				
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	236.056.700					134.285.700					56,89				
Program perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	**371.076.350**					**366.116.605**					98,66				
Perencanaan Tata Ruang	242.200.000					239.725.055					98,98				
Pemanfaatan Tata Ruang	97.701.350					95.641.550					97,89				
Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	31.175.000					30.750.000					98,64				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.708.347.500	12.568.254.600	10.901.530.544	11.573.450.561		2.572.224.587	0,00	10.649.730.356	11.178.959.053		20,47	0	97,69	96,59
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		75.200.000		3.767.500	0		57.663.000	0	3.567.500	-		76,68		94,69	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.150.600	0				2.050.600	-				95,35	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0					-					
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0					-					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.616.900	0				1.516.900	-				93,82	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0					-					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.304.000		7.865.202.990	8.944.089.228		5.250.300	0	7.776.075.091	8.620.624.095		83,28		98,87	96,38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.737.342.990	8.641.857.561				7.648.666.778	8.323.984.095				98,85	96,32
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				126.305.000	302.231.667				125.892.813	296.640.000				99,67	98,15

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.555.000	0				1.515.500	-				97,46	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		8.363.500,00		9.680.000	14.400.000		0	0	9.680.000	14.400.000				100	100
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				9.680.000	14.400.000				9.680.000	14.400.000				100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000	380.000		0	0	97.964.000	380.000				97,96	100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a				100.000.000					97.964.000					97,96	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					380.000					380.000					100
Administrasi Umum Perangkat Daerah		201.000.000		229.048.991	143.182.297		174.586.130	0	177.541.844	139.618.517		86,85		77,51	97,51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor				5.999.921	6.072.750				4.000.000	6.000.000				66,67	98,80

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				26.205.570	5.732.400				24.552.500	5.469.000				93,69	95,41
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.000.000	9.000.000				8.905.000	8.996.625				98,94	99,96
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.252.000	5.000.000				35.239.000	4.999.900				99,96	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000	31.126.147				24.906.800	31.121.050				99,63	99,98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.600.000	0				2.505.000					96,35	
Penyediaan Bahan/Material				25.000.000	28.360.000				24.840.500	26.482.180				99,36	93,38
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.991.500	57.891.000				52.593.044	56.549.762				52,60	97,68
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45.500.000	50.237.500		0	0	42.702.500	49.123.650				93,85	97,78
Pengadaan Alat Besar					0										
Pengadaan Mebel					50.000.000					48.886.150					97,77

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.500.000	237.500				42.702.500	237.500				93,85	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.417.480.000		2.352.814.000	2.219.811.000		2.334.725.157	0	2.261.756.464	2.156.397.491		96,57		96,13	97,14
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000	1.000.000				1.965.000	1.000.000				98,25	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				129.400.000	125.400.000				100.937.714	116.350.616				78,00	92,78
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.100.000	4.700.000				5.100.000	4.700.000				100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.216.314.000	2.088.711.000				2.153.753.750	2.034.346.875				97,18	97,40
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295.517.063	201.350.536		0	0	280.442.957	198.415.300				94,90	98,54

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.147.064	63.980.536				92.910.807	62.767.800				92,77	98,10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				165.000.000	120.000.000				160.562.150	118.337.500				97,31	98,61
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.870.000	4.870.000				9.670.000	4.830.000				97,97	99,18
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.499.999	12.500.000				17.300.000	12.480.000				84,39	99,84
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		17.377.792.830	48.693.599.000	21.375.551.264	6.792.352.900		14.633.036.036	42.902.621.437	14.657.440.713	6.608.154.178		30,05	88,10	97,69	96,59
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah			23.183.950.000	4.698.300.000	5.114.276.960		0	22.716.322.920	4.082.988.515	4.962.179.428			97,98	86,90	97,03

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kabupaten/Kota															
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota					0										
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota					0										
Normalisasi/Restorasi Sungai					0										
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					0										
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya					0										
Pembangunan Tanggul Sungai				4.570.000.000	5.114.276.960				3.956.243.165	4.962.179.428				86,57	97,03

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				65.000.000	0				63.983.175					98,44	
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota					0										
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku				63.300.000	0				62.762.175					99,15	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		17.377.792.830	25.509.649.000	17.377.792.830	17.377.792.830		14.633.036.036	20.186.298.517	10.574.452.198	1.645.974.750		57,36	79,13	94,69	96,59
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				16.582.005.164	1.338.075.940				10.490.231.098	1.307.677.750				63,26	97,73

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rehabilitasi Bendung Irigasi					0										
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				55.246.100	310.000.000				55.246.100	308.297.000				100	99,45
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi				40.000.000	30.000.000				28.975.000	30.000.000				72,44	100
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					0										
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			9.360.893.000	11.308.795.000	3.839.824.000		0	7.912.845.455	9.541.615.724	3.515.365.788		0	84,53	84,37	91,55
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			9.360.893.000	11.308.795.000	3.839.824.000		0	7.912.845.455	9.541.615.724	3.515.365.788			84,53	84,37	91,55

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM				162.500.000					110.139.873					67,78	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					0										
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					3.739.824.000					3.511.419.788					93,89
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan				6.757.294.000					5.617.763.554					83,14	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				4.389.001.000	100.000.000				3.813.712.297	3.946.000				86,89	3,95
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			1.200.000.000		0			1.199.199.500		-		0	99,93		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			1.200.000.000		0			1.199.199.500		-		0	99,93		
Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS					0					-					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			2.263.508.000	2.130.603.700	3.588.716.000		0	2.013.551.443	1.985.490.173	3.526.359.572			88,95	93,19	98,26
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.263.508.000	2.130.603.700	3.588.716.000		0	2.013.551.443	1.985.490.173	3.526.359.572			88,95	93,19	98,26
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					0										
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja					0										
Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				1.818.861.000					1.818.000.000					99,95	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				145.761.000	90.000.000				63.281.499	51.508.572				43,41	57,23
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT				165.981.700					104.208.674					62,78	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					3.498.716.000					3.474.851.000					99,32
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					0										
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			3.135.000.000	228.783.750	295.582.000		0	2.640.328.725	189.778.900	286.582.000		0	84,22	82,95	96,96

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.135.000.000	228.783.750	295.582.000		0	2.640.328.725	189.778.900	286.582.000			84,22	82,95	96,96
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan					195.582.000					186.582.000					95,40
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				228.783.750	100.000.000				189.778.900	100.000.000				82,95	100
Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan					0										
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					0										
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			5.736.523.690	10.304.634.740	2.516.600.000		0	5.680.000.423	9.755.626.983	2.381.302.761		0	99,01	94,67	94,62

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			5.736.523.690	10.304.634.740	2.516.600.000		0	5.680.000.423	9.755.626.983	2.381.302.761		0	99,01	94,67	94,62
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota					2.442.150.000					2.343.802.761					95,97

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				31.453.740	74.450.000				27.187.000	37.500.000				86,43	50,37
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				10.273.181.000					9.728.439.983					94,70	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			2.533.324.132	226.539.000	39.347.850		0	2.285.226.085	215.156.282	39.347.850		0	90,20	94,98	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			2.533.324.132	226.539.000	39.347.850		0	2.285.226.085	215.156.282	39.347.850		0	90,20	94,98	100
Penataan Bangunan dan Lingkungan				226.539.000					215.156.282					94,98	
Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan					39.347.850					39.347.850					100
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	NA	56.468.445.298	246.952.836.242	128.684.851.963	35.075.274.000		42.239.224.098	64.791.270.889	122.796.251.253	33.953.505.926		17,10	26,23	95,42	96,80
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		56.468.445.298	246.952.836.242	128.684.851.963	35.075.274.000		42.239.224.098	64.791.270.889	122.796.251.253	33.953.505.926		17,10	26,23	95,42	96,80
Pembangunan Jalan				43.129.712.431	24.459.030.000				41.867.086.671	23.988.047.654				97,07	98,07
Pemeliharaan Berkala Jalan				35.367.407.000	50.800.000				34.829.293.167	50.800.000				98,48	100
Pelebaran Jalan Menuju Standar				38.252.363.324	5.300.000				34.923.836.797	5.300.000				91,30	100
Rehabilitasi Jalan				4.385.953.300					4.350.089.643					99,18	
Pemeliharaan Rutin Jembatan				1.000.000.000	0				951.699.300					95,17	
Rehabilitasi Jembatan					0										
Pembangunan Jembatan				1.440.803.919	128.463.919				1.410.154.400	127.530.775				97,87	99,27

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Survey Kondisi Jalan/Jembatan				350.000.000	346.100.000				290.323.500	295.624.700				82,95	85,42
Rehabilitasi Jalan					2.201.159.000					2.178.649.997					98,98
Pemeliharaan Rutin Jalan				4.758.611.989	7.884.421.081				4.173.767.775	7.307.552.800				87,71	92,68
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			50.000.000	24.484.500	13.000.000		0	46.190.000	13.853.500	8.980.000		0	92,38	56,58	69,08
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			50.000.000					46.190.000		-			92,38		
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operatordan Teknisi atau Analis					0										
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				24.484.500	13.000.000		0	0	13.853.500	8.980.000				56,58	69,08
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				13.033.990					5.688.500					43,64	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				11.450.510					8.165.000					71,31	
Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI					13.000.000					8.980.000					69,08
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		427.400.500	694.400.000	376.484.820	60.000.000		417.443.056	448.447.674	116.786.691	58.746.494		60,11	64,58	31,02	97,91
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		256.358.400	100.000.000	68.065.000	30.000.000		247.155.916	57.878.700	2.181.500	29.397.494		247,15	57,87	3,21	97,99
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				55.725.500					2.181.500					3,91	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang				12.339.500					0					-	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penataan Ruang															
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota					30.000.000					29.397.494					97,99
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang					0										
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			469.400.000	255.000.000	0		0	265.938.974	83.024.191	0			56,655086	32,56	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				255.000.000	0				83.024.191					32,56	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		135.552.100	75.000.000	40.007.000	20.000.000		135.002.140	74.880.000	21.517.000	19.646.000		180,0029	99,84	53,78	98,23
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					20.000.000					19.646.000					98,23

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				40.007.000					21.517.000					53,78	
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					0										
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		35.490.000	50.000.000	13.412.820	10.000.000		35.285.000	49.750.000	10.064.000	9.703.000		70,57	99,5	75,03	97,03
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				13.412.820					10.064.000					75,03	
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat					10.000.000					9.703.000					97,03

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sangat luas dan beragam, secara umum kelompok sasaran layanan tersebut meliputi:

- Masyarakat Umum

  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melayani masyarakat dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur didukung oleh penataan ruang yang terpadu seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, persetujuan bangunan gedung, informasi tata ruang, perencanaan tata ruang, dan bantuan teknis pembangunan Gedung. Masyarakat Kabupaten Rembang secara langsung maupun tidak langsung merasakan dampak dari layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang, mulai dari jalan yang mulus, sistem drainase yang baik, hingga ketersediaan air bersih di beberapa area yang menjadi kewenangan Dinas.

- Pemerintah Daerah

  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan tugas pembantuan, dan mengkoordinasikan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang seperti penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2022-2042 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang yang berkoordinasi dengan Ditjen Tata Ruang, Dinas Pusdataru Prov. Jawa Tengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), DPUTARU Kab Rembang untuk Proses mempersiapkan ruang untuk pembangunan 20 tahun kedepan dengan muatan-muatan strategis dalam RTRW, meliputi Garis Pantai; Batas administrasi; Kawasan Hutan; Kawasan Pertanian; Mitigasi Bencana; serta Kawasan Lindung.

- Pelaku usaha/swasta

  Pengembang Perumahan dan Real Estate: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang menjadi mitra penting dalam perizinan

pembangunan, penyediaan infrastruktur dasar di kawasan perumahan (jalan lingkungan, drainase), dan memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Industri dan Investor: Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan akses, jaringan air, dan penataan kawasan industri yang baik menjadi faktor penarik investasi dan kelancaran operasional perusahaan.

- Lembaga Pendidikan dan Penelitian

  Perguruan Tinggi/Sekolah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang dapat menjadi lokasi praktik kerja lapangan bagi siswa SMK maupun mahasiswa dari jurusan yang berkaitan serta menjadi sumber data untuk penelitian terkait infrastruktur dan tata ruang.

  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang memiliki peran penting dalam melayani masyarakat dan pemerintah daerah terkait infrastruktur dan penataan ruang. Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga perencanaan tata ruang dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berperan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan bagi masyarakat.

  .

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam pemberian layanan adalah penyedia jasa konstruksi, baik itu konsultan maupun kontraktor. Kemitraan ini terjalin melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang umumnya dilakukan lewat lelang elektronik (LPSE). Berikut ini rincian peran masing masing mitra:

- Konsultan

  Konsultan berperan dalam tahap perencanaan dan pengawasan. Mereka adalah mitra ahli yang membantu DPUTARU dalam:

  - Perencanaan Teknis: Membuat desain rinci (Detail Engineering Design/DED), studi kelayakan, survei, dan perhitungan teknis untuk

sebuah proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, atau saluran irigasi.

- Pengawasan Proyek**:** Mengawasi jalannya pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh kontraktor untuk memastikan spesifikasi teknis, kualitas pekerjaan, waktu, dan biaya sesuai dengan kontrak.

▪ Kontraktor (Penyedia Jasa Konstruksi)

Kontraktor adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan berdasarkan desain dan spesifikasi yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Peran mereka meliputi

- Pembangunan Fisik: Membangun atau memperbaiki infrastruktur secara langsung, misalnya pengaspalan jalan, pembangunan jembatan atau normalisasi sungai.
- Penyediaan Tenaga Kerja dan Material: Menyediakan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, termasuk tenaga ahli, pekerja, alat berat, dan bahan bangunan.

▪ Mitra Lainnya

Selain dua mitra utama di atas, DPUTARU Rembang juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain, seperti:

• Instansi Pemerintah Terkait: Berkoordinasi dengan dinas lain di tingkat kabupaten (seperti Bappeda, DLH, BPBD, Dinas Perhubungan), pemerintah provinsi (misalnya Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah), dan pemerintah pusat (misalnya Balai Besar Wilayah Sungai) untuk sinkronisasi program dan perizinan.

• Masyarakat: Masyarakat seringkali menjadi mitra dalam bentuk partisipasi, misalnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur. Masyarakat juga menjadi pengawas sosial terhadap proyek yang berjalan di lingkungan mereka.

• Akademisi dan Tenaga Ahli: Dalam beberapa kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang dapat melibatkan akademisi

dari perguruan tinggi atau tenaga ahli spesialis untuk mendapatkan kajian atau masukan teknis yang mendalam

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) berperan sebagai mitra strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang karena keduanya sama-sama bertugas mendukung pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Dukungan yang dapat diberikan BUMD antara lain:

- Dukungan pada Penyedian Air Bersih dan Sanitasi

  Melalui Perumda Banyumili Rembang, BUMD menyediakan jaringan distribusi air bersih untuk rumah tangga, perkantoran, dan kawasan industri. Hal ini mendukung program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang dalam pembangunan jaringan air minum SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan sanitasi perkotaan/perdesaan. Dengan adanya Perumda Banyumili, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur jaringan sementara operasional pelayanan air dilakukan BUMD.
- Kontribusi Finansial

  BUMD menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) melalui deviden dan pajak yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk di sektor pekerjaan umum.
- Mendukung Kinerja dan Akuntabilitas

  Sinergi yang baik antara BUMD dan DPUTARU dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melakukan kerjasama daerah terutama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana untuk melakukan normalisasi sungai di beberapa wilayah seperti Desa Jurangjero dan Trahan, Kecamatan Sluke. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya banjir akibat curah hujan yang tinggi. sebagai upaya pencegahan banjir, serta berpotensi bekerjasama dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) untuk penanganan jalan nasional.

2.2 Permasalahan dan Isu Stategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a.) Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Sedangkan permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan.

Kapasitas dan kualitas infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan. Infrastruktur adalah bidang yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kondisi sosial dan ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur-infrastruktur tersebut dapat membuka serta meningkatkan akses yang diperlukan masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia untuk mendorong mobilitas sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonomi dan daya saing sumber daya manusia akan tercapai maksimal apabila daya saing infrastrukturnya tersedia dengan baik. Hampir di semua aspek pembangunan memiliki permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana atau infrastruktur, fasilitas bangunan atau gedung menjadi aspek penting dalam pemberian pelayanan publik bagi masyarakat. Selain ketersediaan fasilitas infrastruktur seperti jalan dan jembatan jalan dan jembatan, masih banyak jalan kabupaten yang belum dalam kondisi baik yang membuat lalu lintas peredaran barang dan jasa menjadi terhambat. Begitu juga jalan-jalan yang ada di daerah pelosok yang berada pada titik rawan bencana yang sering kali sulit dilalui jika terjadi bencana. Permasalahan sumber daya air juga menjadi permasalahan yang tidak kalah penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, secara khusus di Kabupaten Rembang sumber air baku diperoleh melalui daerah tangkapan air daerah kawasan lindung pegunungan Karst yang mulai dieksploitasi sebagai daerah pertambangan. Ketersediaan air baku sangat penting untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat sehari-hari, industri, pariwisata dan aktivitas lainnya, sehingga sumber air yang ada di Kabupaten Rembang sangat perlu untuk diupayakan kelestariannya.

Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

  Sebagian jalan kabupaten masih rusak, berlubang, atau belum beraspal, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.

  Jembatan penghubung antar desa/kecamatan ada yang berusia tua dan butuh rehabilitasi.

  Keterbatasan anggaran membuat perbaikan dilakukan secara bertahap.
- Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

  Akses air bersih belum merata, terutama di desa-desa pesisir dan daerah kering (selatan Rembang).

  Fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah masih minim, sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.
- Permasalahan Sumber Daya Air

  Kekeringan di musim kemarau mengurangi pasokan air untuk pertanian.

  Banjir rob dan banjir luapan sungai kerap terjadi di wilayah pesisir utara (Rembang kota, Lasem).

  Jaringan irigasi sebagian besar sudah tua dan memerlukan rehabilitasi.
- Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan

  Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman/industri masih terjadi tanpa perencanaan yang matang. RTRW Kabupaten perlu pembaruan agar sesuai dengan RTRW Provinsi dan kebijakan nasional (RPJMN/RPJPN).

  Pengawasan pemanfaatan ruang belum optimal akan memunculkan pembangunan yang tidak sesuai peruntukan.
- Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia

  Besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak sebanding dengan kapasitas APBD, Masih ada keterbatasan tenaga teknis dan tenaga ahli

sehingga perlu peningkatan kapasitas aparatur dalam hal teknologi informasi (digitalisasi perencanaan dan monitoring proyek).

- Kualitas Layanan Publik

  Prosedur layanan teknis (misalnya izin pemanfaatan ruang, rekomendasi teknis bangunan, konsultasi infrastruktur) masih dianggap berbelit dan lambat.

  Pengaduan masyarakat terkait kerusakan jalan/banjir sering tidak cepat ditangani karena keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran.

b.) Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, Untuk mencapai visi nasional, RPJMN 2025–2029 merumuskan Asta Cita, yang terdiri atas delapan misi pembangunan nasional. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang selaras dengan asta cita yaitu:

- Asta Cita Nomor 2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Asta Cita Nomor 3 yaitu Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- Asta Cita Nomor 8 yaitu Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Telaahan terhadap kebijakan nasional ini disusun untuk

memastikan keselarasan antara arah kebijakan nasional dengan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2027, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di daerah dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara efektif dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan nasional Tahun 2027 pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Rembang. Diperlukan sinkronisasi dan penyesuaian program dan kegiatan agar tujuan pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai secara optimal.

c.) Telaah Renstra Terhadap Kebijakan Provinsi Jateng

Telaah terhadap kebijakan Provinsi Jawa Tengah dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang selaras dengan arah kebijakan pembangunan provinsi. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Telaahan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ini disusun sebagai dasar untuk memastikan keterpaduan, keselarasan, dan konsistensi antara kebijakan provinsi dengan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Selaras dengan Misi Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- Misi Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan
- Misi Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 yaitu Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif

- Misi Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan pada:

- Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur wilayah, khususnya jaringan jalan dan jembatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
- Penguatan penataan ruang yang tertib, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, melalui pengendalian pemanfaatan ruang.
- Peningkatan pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur pendukung, guna mendukung ketahanan wilayah dan pengurangan risiko bencana.
- Peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berdasarkan hasil telaah terhadap kebijakan Provinsi Jawa Tengah tersebut, perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanaan insfrastruktur. Dengan demikian, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara sinergis dan berkelanjutan.

d.) Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Telaah terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Telaah ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keselarasan dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah kabupaten dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.

Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas dan kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung, penguatan jasa konstruksi. Kebijakan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum agar tercipta sinergi antara program pembangunan provinsi dan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam penyusunan Renstra dan rencana kerja tahunan berupaya mengakomodasi kebijakan dan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini diwujudkan melalui penyelarasan sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung, pengembangan jasa konstruksi di Kabupaten Rembang.

Melalui proses telaah ini diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Rembang, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu, sinergi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang secara berkelanjutan.

e.) Telaah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Telaah terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dilakukan sebagai upaya untuk memastikan adanya keselarasan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Rembang. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Secara fundamental, Renstra DPUTARU Kabupaten Rembang selaras dengan arah kebijakan Dinas PUSDATARU Jawa Tengah yang menekankan pada ketahanan infrastruktur sumber daya air dan keterpaduan penataan ruang.

Dinas PUSDATARU Jateng memiliki mandat pada sungai-sungai kewenangan provinsi. DPUTARU Rembang mensinkronkan ini melalui pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang terhubung embung guna memastikan suplai air baku dan pertanian tetap terjaga untuk mendukung ketahanan pangan.

Dalam hal penataan ruang, Renstra DPUTARU Rembang telah mengadopsi prinsip yang selaras dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penguatan dokumen tata ruang (RDTR) di tingkat kabupaten menjadi fokus sinkronisasi utama.

f.) Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah **"Mewujudkan Rembang Sejahtera",** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Mengembang 3 misi yaitu

Misi 2 : **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan;**

Misi 4 : **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan;**

Misi 5 : **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.**

Untuk Mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang memiliki beberapa program yaitu:

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3.) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4.) Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
5.) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6.) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
7.) Program Penataan Bangunan Gedung
8.) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
9.) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
10.) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11.) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

g.) Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sekitar

Sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan harmonisasi pembangunan wilayah, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang juga mempertimbangkan arah kebijakan strategis dan prioritas pembangunan dari kabupaten-kabupaten sekitar yang memiliki keterkaitan geografis, sosial, ekonomi, maupun ekologis dengan Kabupaten Rembang. Kabupaten tetangga seperti Kabupaten Pati, Blora, Tuban, dan Bojonegoro memiliki kesamaan karakter wilayah maupun tantangan pembangunan, sehingga menjadi relevan untuk dijadikan bahan telaahan komparatif. Secara umum, dokumen Renstra dari kabupaten-kabupaten tersebut menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap pengembangan potensi unggulan daerah, penguatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, serta peningkatan infrastruktur dasar yang merata. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga relatif serupa, seperti kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, degradasi lingkungan dan masih banyak lainnya. Dari telaahan tersebut

dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan visi pembangunan di tingkat regional, khususnya dalam upaya Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan Kesamaan arah ini menjadi peluang bagi Kabupaten Rembang untuk memperkuat kerja sama antar daerah, baik dalam bentuk forum koordinasi perencanaan, kemitraan pembangunan lintas batas, maupun kolaborasi riset dan pengembangan. Dengan mengkaji Renstra dari kabupaten sekitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dapat memperoleh referensi strategi dan inovasi yang telah diimplementasikan, sekaligus membangun posisi strategis Kabupaten Rembang dalam konteks pembangunan regional yang lebih luas.

h.) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2023–2043 merupakan dokumen perencanaan spasial yang memuat arah pengembangan ruang wilayah kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk jangka waktu dua puluh tahun ke depan. RTRW menjadi acuan utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral, termasuk dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang, RTRW menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Penetapan kawasan peruntukan industri, permukiman, pertanian, pariwisata, konservasi, dan infrastruktur dalam RTRW menjadi landasan bagi perumusan program dan kegiatan yang berbasis wilayah (place-based planning).

Hal ini penting untuk memastikan keterpaduan antara rencana sektoral dan spasial, serta mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Selain itu, RTRW juga menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan pembangunan dengan upaya mitigasi risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, serta pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang perlu mengakomodasi prinsip-prinsip

keberlanjutan dan ketahanan wilayah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RTRW. Secara keseluruhan, RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023–2043 memberikan kerangka ruang yang jelas dan terukur bagi pembangunan daerah, sehingga menjadi rujukan utama dalam menyusun visi, misi, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah daerah secara terpadu dan berwawasan spasial.

i.) Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Tahun 2025–2029 dilakukan dengan memperhatikan hasil KLHS yang telah dilakukan terhadap RPJMD Kabupaten Rembang 2025–2029, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS RPJMD Kabupaten Rembang telah mengidentifikasi 10 isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi tantangan lintas sektor dan perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Isu-isu tersebut adalah:

1. Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah belum maksimal
2. Kemiskinan
3. Kesetaraan gender
4. Ketahanan pangan
5. Penyediaan infrastruktur daerah belum merata
6. Pengelolaan sumber daya air belum maksimal
7. Pengelolaan kualitas lingkungan hidup belum optimal
8. Kelestarian kawasan lindung
9. Kualitas sumber daya manusia masih rendah
10. Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan belum maksimal

Isu Penyediaan infrastruktur daerah belum merata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur didukung penataan ruang yang terpadu perlu merespon hasil KLHS dengan memastikan bahwa strategi, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra selaras dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Dengan mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu berperan aktif dalam mengarahkan pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian visi "Mewujudkan Rembang Sejahtera"

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/ panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional, dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.9

Isu Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Rembang memiliki jalur pantura sebagai jalur utama di Pulau Jawa yang menghubungkan berbagai provinsi untuk mendukung aktivitas ekonomi, mobilitas dan transportasi wilayah	Kapasitas dan kualitas infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan	Penyediaan Infrastruktur Daerah Belum Merata	Kemitraan Global	Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Pengembangan Wilayah
Tersedianya waduk, embung dan bendungan	Daya dukung air yang rendah	Pengelolaan Sumber Daya Air Belum Maksimal				

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Setelah mempertimbangkan berbagai isu strategis global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Rembang, dapat dirumuskan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Pengembangan Wilayah.

Keberadaan jalur Pantura juga jaringan jalan kabupaten yang telah menghubungkan semua wilayah kecamatan dan desa, merupakan infrastruktur pokok sebagai satu kesatuan sistem transportasi Nasional, sistem transportasi wilayah maupun sistem transportasi lokal dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Di sepanjang koridor Pantura yang melintasi Kabupaten Rembang telah berkembang berbagai aktivitas ekonomi, seperti industri, jasa, perdagangan, perhubungan darat dan perhubungan laut. Selain itu, keberadaan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang didukung infrastruktur pendukungnya seperti ketersediaan air baku, energi listrik dan telekomunikasi menjadi kekuatan untuk pengembangan potensi pantai melalui pembangunan pelabuhan perikanan pantai dan pelabuhan umum yang dipadukan dengan pengembangan industri pengolahan berbasis pertambangan, pertanian, perkebunan maupun perikanan dan kelautan. Kondisi Kabupaten Rembang yang relatif berkembang pada bagian pantai utara menimbulkan kesenjangan dengan wilayah bagian selatan. Konsentrasi aktivitas di pantai utara mempercepat pertumbuhan kawasan melalui mekanisme pasar sementara pada wilayah bagian selatan yang mobilitas angkutan barang dan manusia relatif terbatas berkembang relatif lambat, sehingga untuk dapat mengimbangi perkembangan di bagian utara diperlukan insentif berupa alokasi pembangunan secara afirmatif fiskal ke bagian wilayah selatan, agar terjadi pemerataan pembangunan.

Di sisi lain terkait pembangunan infrastruktur wilayah masih dihadapkan beberapa kelemahan seperti masih kurang optimalnya pengaturan dalam pembangunan infrastruktur, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman masih kurang, kondisi infrastruktur permukiman seperti air minum, drainase, persampahan maupun air limbah belum begitu memadai, infrastruktur pelabuhan masih kurang, begitu juga dengan pengelolaan

potensi air permukaan yang belum optimal untuk menampung kelebihan air pada musim hujan melalui pembangunan embung, bendung dan check dam.

Peluang eksternal pengembangan infrastruktur wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Rembang sangat terbuka karena wilayah Kabupaten Rembang menjadi simpul transportasi darat, memiliki potensi terminal barang untuk mengelola peredaran arus barang yang semakin meningkat. Di samping itu keunggulan Kabupaten Rembang menjadi waterfront city yang memberikan peluang dalam pengembangan kota bahari untuk memicu pengembangan daerah sekitar. Sementara faktor risiko dalam pengembangan infrastruktur wilayah masih dihadapkan pada persoalan seperti kejadian bencana banjir, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor dan kekeringan serta fluktuasi harga bahan bangunan sebagai dampak inflasi secara Nasional. Hal ini membutuhkan penanganan yang komprehensif agar pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan baik.

Rencana Pembangunan Tol dan Reaktivasi Kereta Api Rembang Sebagai Backbone Ekonomi dan Industri juga perlu menjadi isu strategis yang perlu menjadi prioritas pembangunan untuk diwujudkan. Keberadaan tol dan jalur kereta api dapat meningkatkan konektivitas antar daerah, manfaat praktis yang dirasakan jika satu daerah terkoneksi dengan daerah lainnya adalah pertumbuhan ekonomi. Secara khusus bagi Kabupaten Rembang yang selama ini masih mengandalkan posisi jalur pantura sebagai jalur utama untuk menghubungkan Rembang dengan Kabupaten/Kota lain di pantai utara Pulau Jawa. Simpul lainnya seperti jalan provinsi yang menghubungkan Rembang-Grobogan, atau Rembang-Blora merupakan jalur alternatif yang dapat ditempuh dari Kabupaten yang berada di sebelah selatan Kabupaten Rembang, sekaligus juga menjadi jalur alternatif jika jalur Pantura mengalami kelumpuhan. Situasi ini tentu memberikan dampak negatif ketika terjadi kelumpuhan jalur pantura sektor Demak-Kudus-Pati Rembang, yang dalam beberapa tahun terakhir sangat rentan mengalami bencana Banjir. Kelumpuhan yang terjadi di jalur Pantura sangat berdampak bagi Kabupaten Rembang yang juga berada di ujung timur Provinsi

Jawa Tengah. Dampak paling utama yaitu terhambatnya lalu-lintas barang dan jasa yang akan masuk dan keluar dari Kabupaten Rembang.

Situasi ini menghadirkan pentingnya pembangunan Tol dan reaktivasi jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Rembang sebagai simpul transportasi yang dapat dimanfaatkan sebagai lalu-lintas barang dan jasa. Pembangunan tol dan reaktivasi jalur kereta api dipandang sangat penting, jika pembangunannya dapat direalisasikan pada beberapa tahun ke depan, tentu memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Rembang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang perlu menyiapkan aspek-aspek pendukung, agar rencana pembangunan tol dan reaktivasi Jalur Kereta Api di Kabupaten Rembang dapat direalisasikan segera. Pembangunan jalan lingkar Kabupaten Rembang juga memiliki potensi besar untuk mendorong perkembangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan lingkar merupakan salah satu proyek infrastruktur yang sangat penting bagi pengembangan wilayah dan peningkatan konektivitas. Jalan lingkar dapat mengalihkan lalu lintas dari pusat kota, mengurangi kemacetan dan memperlancar arus kendaraan. Dengan mengurangi kemacetan, perjalanan menjadi lebih cepat dan efisien, menghemat waktu dan biaya operasional kendaraan. Jalan lingkar meningkatkan konektivitas antar wilayah yang penting untuk perdagangan dan mobilitas penduduk serta membuka akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, mendorong perkembangan ekonomi dan sosial di daerah-daerah tersebut. Dengan mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota, risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Memudahkan akses bagi layanan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan polisi, sehingga respon terhadap keadaan darurat dapat lebih cepat. Pembangunan jalan lingkar dapat mengatur penyebaran pembangunan kota agar tidak terkonsentrasi di pusat kota saja, membantu dalam perencanaan tata ruang yang lebih baik. Infrastruktur yang baik menarik investasi dari sektor swasta, baik domestik maupun asing, yang mendorong pembangunan ekonomi wilayah.

Pembangunan jalan lingkar memiliki signifikansi strategis yang luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan mengatasi isu isu strategis tersebut, jalan lingkar tidak hanya dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan, tetapi juga mendorong perkembangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pentingnya pembangunan jalan lingkar harus dipahami dalam konteks yang komprehensif, dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

Pembangunan pelabuhan nasional Sluke juga memainkan peran yang sangat vital dalam pertumbuhan ekonomi, konektivitas internasional, dan pengembangan wilayah. Pembangunan pelabuhan nasional memiliki dampak strategis yang sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas internasional, dan mengembangkan wilayah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang untuk periode 2025–2029 sebagai landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029. Rumusan ini disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatnya kualitas pelayanan Infrastruktur didukung oleh penataan ruang yang terpadu.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan perangkat daerah diambil dari sasaran daerah dengan indikator menyesuaikan urusan masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan rumusan Visi **"Mewujudkan Rembang Sejahtera"** menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan yang ingin dicapai dari tahun 2025 sampai tahun 2029 adalah menjadikan Kabupaten Rembang menjadi wilayah yang sejahtera. Sejahtera pada visi tersebut bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Rembang yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya (pangan, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak dan perlindungan sosial), dan merasakan keamanan, ketenteraman dan kebahagiaan lahir dan batin.

Kesejahteraan ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, tingkat produktivitas yang tinggi dan tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Di samping itu juga memiliki daya saing, modern, inovatif, mandiri dan tangguh dalam lingkungan hidup yang lestari. Sedangkan Misi adalah pernyataan yang menjelaskan langkah-langkah strategis dan operasional untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan. Misi berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam

menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi daerah.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang 2025-2029 dirumuskan dalam lima butir, merupakan gambaran aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai visi Mewujudkan Kabupaten Rembang Sejahtera, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berupaya untuk mewujudkan 3 Misi yaitu

Misi 2 : **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan;**

Misi 4 : **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan;**

Misi 5 : **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.**

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak pada pertumbuhan investasi serta konektivitas wilayah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Rembang dalam beberapa tahun ke depan. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi baru yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis akan dilakukan untuk memastikan infrastruktur yang tersedia mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara optimal.

Salah satu fokus utama dalam pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas dan ketersediaan jalan, jembatan, irigasi, serta drainase yang menjadi kewenangan kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang akan terus melakukan perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan guna meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, terutama di daerah yang masih terisolasi. Selain itu, perbaikan sistem irigasi akan menjadi perhatian utama untuk mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sistem drainase yang baik juga akan terus dikembangkan guna mengurangi risiko banjir, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.

Selain pembangunan infrastruktur transportasi dan pengairan, pemenuhan kebutuhan air minum yang layak serta infrastruktur dasar bagi masyarakat juga menjadi prioritas penting. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang akan memperluas cakupan layanan air bersih dan sanitasi yang layak, terutama di daerah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses. Program pembangunan dan rehabilitasi jaringan perpipaan, penyediaan sumur bor, serta pengelolaan air limbah yang lebih baik akan terus dikembangkan agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan air bersih secara merata.

Tujuan dan sasaran merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Rembang periode 2025-2029. Tujuan merujuk pada Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan guna mewujudkan visi, mengimplementasikan misi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah. Dengan adanya tujuan yang jelas, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, sasaran adalah hasil konkret yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, realistis, serta dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga evaluasi terhadap pencapaian pembangunan dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, penyusunan tujuan dan sasaran yang tepat akan

memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Keselarasan antara tujuan dan sasaran juga menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan menuju Rembang yang Sejahtera.

Rumusan tujuan dan sasaran dari misi yang ingin dicapai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah ada pada misi 4 yaitu Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan. Tujuan yang akan mendukung pelaksanaan misi keempat ini adalah: **Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang Tangguh** dengan indikator **Indeks Infrastruktur**. Sasaran daerah yang akan dicapai yaitu **Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur konektivitas wilayah** dengan Indikator **Indeks Infrastruktur Konektivitas Wilayah.**

Tujuan OPD merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD dengan memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatnya kualitas pelayaanan insfrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian daerah** dengan Indikator Indeks Aksesibilitas Infrastruktur.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang periode Tahun 2025-2029 adalah:

A. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   Dengan Indikator : Indeks Aksesibilitas Jalan
B. Meningkatnya Akses Layanan Dasar;
   Dengan Indikator : Indeks Akses Layanan Dasar

C. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air;
   Dengan Indikator : Indeks Kinerja Pengelolaan SDA Kabupaten
D. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
   Dengan Indikator : Indeks Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
E. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi;
   Dengan Indikator : Indeks Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi
F. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah DPUTARU Kabupaten Rembang
   Dengan Indikator : Nilai SAKIP DPUTARU, Indeks Kepuasan Masyarakat DPUTARU, Indeks Manajemen Risiko DPUTARU

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DPUTARU KAB REMBANG TAHUN 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur	Meningkatnya kualitas pelayaanan insfrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian daerah		Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Angka	64,95	70,44	56,28	61,07	66,65	71,78	78,62	
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur konektivitas wilayah		Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	Angka	0,4076	0,4083	0,4091	0,4136	0,4191	0,4250	0,4310	
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur		Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Akses Layanan Dasar	Angka	33,88	37,30	41,30	45,90	50,97	56,66	63,17	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
konektivitas wilayah												
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur konektivitas wilayah		Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi	Angka	31,95	40	55	65	75	85	100	
Meningkatnya ketahanan pangan		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Pengelolaan SDA Kabupaten	Angka	57,57	58,95	60,32	62,63	66,6	68,74	74,24	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Angka	45	45	46	57,5	70	81,5	92,5	
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah DPUTARU	Nilai SAKIP DPUTARU	Angka	64,95	72,72	64,95	64,96	64,97	64,98	64,99	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kabupaten Rembang										
			Indeks Kepuasan Masyarakat DPUTARU	Angka	77,9	72,72	78	78,05	78,1	78,15	78,2	
			Indeks Manajemen Risiko DPUTARU	Angka	NA	NA	2,705	2,785	2,868	2,953	3,040	

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Kebijakan merupakan satu arah tindakan yang diambil pemerintah dalam suatu situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena kebijakan adalah merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna terwujudnya sinergitas keterpaduan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatan kinerja. Faktor – faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah.

Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dalam rangka Meningkatnya kualitas pelayaanan insfrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian daerah dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran ini adalah:
  - Peningkatan Aksesibilitas dan Pemerataan Pembangunan Jalan di Seluruh Wilayah Kabupaten
  - Optimalisasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan secara Rutin dan Berkala
  - Peningkatan Kualitas Konstruksi dan Standar Mutu Pekerjaan
  - Penguatan Perencanaan Teknis dan Penyusunan Dokumen Engineering
  - Pemanfaatan anggaran secara maksimal untuk pembangunan jalan dan jembatan

- Meningkatnya Akses Layanan Dasar strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah:
  - Penguatan Infrastruktur Drainase untuk Mengurangi Genangan dan Banjir
  - Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sistem Sanitasi Lingkungan
  - Penyusunan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang yang Mendukung Akses Layanan Dasar
  - Optimalisasi Pemeliharaan Infrastruktur untuk Menjamin Keberlanjutan Layanan Dasar
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur
- Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah:
  - Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
  - Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pengendalian Banjir
  - Peningkatan Kapasitas dan Efisiensi Pengelolaan Embung
  - Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Air Berbasis Data
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA secara Partisipatif
  - Optimalisasi Perencanaan Teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
- Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah:
  - Penyusunan dan Pemutakhiran Dokumen Perencanaan Tata Ruang
  - Pemantapan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Perizinan Berbasis Tata Ruang
  - Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
  - Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Berbasis Teknologi Informasi
  - Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
  - Peningkatan Sosialisasi dan Diseminasi Informasi Tata Ruang kepada Masyarakat
  - Penguatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang
  - Optimalisasi Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang

- Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah:
  - Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung
  - Penguatan Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Prasarana Lingkungan
  - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Ahli Jasa Konstruksi
  - Penguatan Sistem Penyediaan Layanan Jasa Konstruksi yang Transparan dan Akuntabel
  - Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan dan Penerbitan Dokumen Bangunan Gedung
  - Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah DPUTARU Kabupaten Rembang strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah:
  - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik secara Responsif dan Terstandar
  - Penguatan Akuntabilitas Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
  - Peningkatan Pengendalian Internal dan Tata Kelola Keuangan
  - Peningkatan Kompetensi SDM dalam Pelayanan Publik dan Pengelolaan Kinerja
  - Penguatan Sistem Pengaduan Masyarakat yang Cepat, Responsif, dan Terintegrasi
  - Peningkatan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik
  - Penerapan Budaya Kerja Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan
  - Optimalisasi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah

Menurut Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, strategi lain yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah melalui Penahapan pembangunan selama periode Renstra. Oleh karena ditetapkan tahapan Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari mulai tahun 2026 sampai tahun 2030. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra DPUTARU

SASARAN	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	1	2	3	4	5
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penyusunan baseline data infrastruktur, kondisi jalan-jembatan seluruh wilayah	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan infrastruktur dasar di wilayah prioritas	Perluasan jaringan infrastruktur konektivitas (jalan-jembatan strategis, akses pusat layanan dasar, pusat ekonomi)	Perbaikan dan pemeliharaan berkelanjutan pada seluruh infrastruktur yang telah dibangun	Finalisasi dan evaluasi target pembangunan jalan, jembatan
Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Pemetaan akses layanan dasar (air minum, sanitasi, drainase,TPST/TPA)	Pembangunan, peningkatan jaringan pelayanan dasar: SPAM, sanitasi aman, drainase perkotaan, fasilitas persampahan	Perluasan cakupan air minum perpipaan, sanitasi aman, drainase perkotaan, fasilitas persampahan	Peningkatan kualitas jaringan air minum, sanitasi aman, drainase perkotaan, fasilitas persampahan	Optimalisasi/Pemantapan layanan dasar untuk capaian standar pelayanan minimal
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Inventarisasi kondisi sumber daya air, Penyusunan DED Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan /Rehabilitasi embung, tampungan air maupun jaringan irigasi	Rehabilitasi jaringan irigasi lintas kecamatan, Penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Revitalisasi embung, peningkatan kapasitas tampungan Revitalisasi jaringan irigasi	Optimalisasi Pembangunan dan rehabilitasi seluruh infrastruktur SDA
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Pemutakhiran peta pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW terbaru.	Penerapan ketentuan zonasi secara penuh dalam perizinan OSS RBA.	Penyesuaian dan revisi zonasi serta Pengawasan terintegrasi pelanggaran pemanfaatan ruang	Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, Penataan kembali kawasan yang mengalami konversi lahan berlebihan	Evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan Finalisasi penertiban pemanfaatan ruang

SASARAN	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi	Inventarisasi bangunan gedung milik pemerintah (BGN) dan aset daerah.	Pembangunan bangunan gedung pemerintah yang termasuk prioritas Renstra	Rehabilitasi lanjutan bangunan yang telah teridentifikasi rusak sedang/berat.	Revitalisasi bangunan publik strategis untuk memenuhi standar bangunan aman dari bencana.	Optimalisasi pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang, 2025

3.4 Arah Kabijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025-2029 sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Untuk itu Arah Kebijakan Pembangunan difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan alam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang. Arah kebijakan Renstra PD sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra DPUTARU

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
1.	UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Pengembangkan dan pemelihara infrastruktur irigasi secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, melalui rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air, pengembangan tampungan air permukaan meliputi embung, bendungan, dan long storage, serta penerapan teknologi irigasi efisien, sehingga mampu menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, memperluas areal tanam, meningkatkan indeks pertanaman, dan memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah.	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang rusak, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air, mengembangkan tampungan air permukaan seperti embung, bendungan, dan long storage guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian.	
2.	• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan • Undang-Undang Republik Indonesia	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang menunjang konektivitas wilayah secara merata dan berkelanjutan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:	Melaksanakan pemetaan dan analisis kondisi infrastruktur dasar per wilayah sebagai dasar perencanaan berbasis kebutuhan dan keadilan spasial,	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
	Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan • Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	• Pemetaan dan analisis kondisi infrastruktur dasar per wilayah meliputi jalan kabupaten, dan jembatan sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan dan keadilan spasial • Optimalisasi pemanfaatan anggaran infrastruktur dari APBD, DAK fisik, Dana Alokasi Khusus Tematik, Dana Desa, serta potensi pembiayaan alternatif melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan CSR, untuk meningkatkan cakupan dan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah. • Peningkatan kompetensi SDM bidang teknis pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk dalam perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pemanfaatan teknologi digital konstruksi dan	mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber pendanaan infrastruktur termasuk APBD, DAK Fisik, DAK Tematik, Dana Desa, KPBU, dan CSR, meningkatkan kompetensi SDM teknis dalam perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, serta pemanfaatan teknologi digital konstruksi dan sistem informasi geospasial	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
		sistem informasi geospasial • Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengawasan digital dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur (misalnya: GIS, dashboard infrastruktur, aplikasi pelaporan masyarakat). • Peningkatan aksesibilitas jalan penghubung antarwilayah dan ke kawasan strategis, terutama jalan ke pusat layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pasar), pusat pertumbuhan ekonomi (pariwisata, pertanian, industri), serta jalan ke wilayah pesisir dan perbatasan kabupaten.		
3.	• UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah • UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman layak yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur pelayanan dasar secara terintegrasi , memperluas layanan air minum perpipaan dan meningkatkan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
	• PP No. 88 Tahun 2021 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). • Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM • Permen PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Pelayanan Minimum SPAM • Permen PUPR No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) • Permen PUPR No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja & Standar IPLT. • Permen PUPR No. 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.	● Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pelayanan dasar secara terintegrasi dan berbasis wilayah prioritas, terutama di daerah rawan bencana, wilayah pesisir; ● redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, untuk mengakomodir kegiatan/subkegiatan penataan akses dan akses untuk dukungan kegiatan Reforma Agraria, serta Memberikan peran aktif tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan Reforma Agraria. ● Perluasan jaringan pelayanan air minum perpipaan, terutama di wilayah yang belum terlayani, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber air baku dengan memperhatikan keberlanjutan dan perlindungan daerah tangkapan air; disertai	kualitas sumber air baku disertai penguatan kelembagaan KPSPAMS; memperluas cakupan sanitasi aman melalui peningkatan layanan air limbah dan revitalisasi IPLT; peningkatan kapasitas dan keterpaduan drainase untuk pengendalian genangan; pengelolaan persampahan skala permukiman seperti TPS3R	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
		penguatan kelembagaan pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik di wilayah perkotaan melalui optimalisasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun di wilayah perdesaan melalui penguatan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ● Memperluas cakupan pelayanan sanitasi aman yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir air limbah secara layak dan aman; revitalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pengolahan sesuai standar, mendukung pencapaian target sanitasi aman; ● Peningkatan kapasitas dan keterpaduan jaringan drainase dalam rangka pengendalian genangan dan banjir; pelaksanaan		

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
		normalisasi saluran drainase secara terencana dan berkesinambungan untuk menjaga fungsi dan kelancaran aliran air; integrasi pembangunan dan pemeliharaan drainase dengan sistem sanitasi aman serta pengendalian pembuangan limbah domestik; ● Pengembangan pengelolaan persampahan skala permukiman melalui fasilitas berbasis masyarakat, seperti TPS3R, bank sampah, dan unit pengolahan sampah mandiri, untuk mengurangi timbulan sampah ke TPA. ● Menguatkan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur; mengoptimalkan pemanfaatan APBD, Dana Desa, CSR, dana hibah, dan sumber pembiayaan alternatif lainnya		
4.	• UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kesesuaian pembangunan	Pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan kesesuaian kegiatan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
	• PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.	infrastruktur dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan RDTR, serta perlindungan Kawasan	pemanfaatan ruang (KKPR), pengawasan dan verifikasi pembangunan terhadap RTRW dan RDTR, serta penerapan mekanisme perlindungan kawasan budidaya dan lindung guna memastikan seluruh pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana tata ruang dan menjaga keberlanjutan lingkungan wilayah	

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perencanaan pembangunan daerah memerlukan kerangka pelaksanaan yang terstruktur agar tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dapat diwujudkan secara terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, pemilihan program, kegiatan, dan subkegiatan menjadi aspek penting yang mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sekaligus menjamin keterkaitan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional tahunan.

Penentuan program dan kegiatan tidak hanya mempertimbangkan target kinerja, tetapi juga menyesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, dalam dokumen Renstra ini, dirumuskan kerangka pelaksanaan melalui daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang terencana, sistematis, dan relevan terhadap isu strategis serta kebutuhan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Rembang.

Bagian ini menyajikan struktur intervensi kebijakan yang akan dijalankan selama periode 2025 hingga 2030 dalam rangka mewujudkan peran sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan yang partisipatif, terpadu, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan bagian ini juga memperhatikan keselarasan dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025–2029.

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan

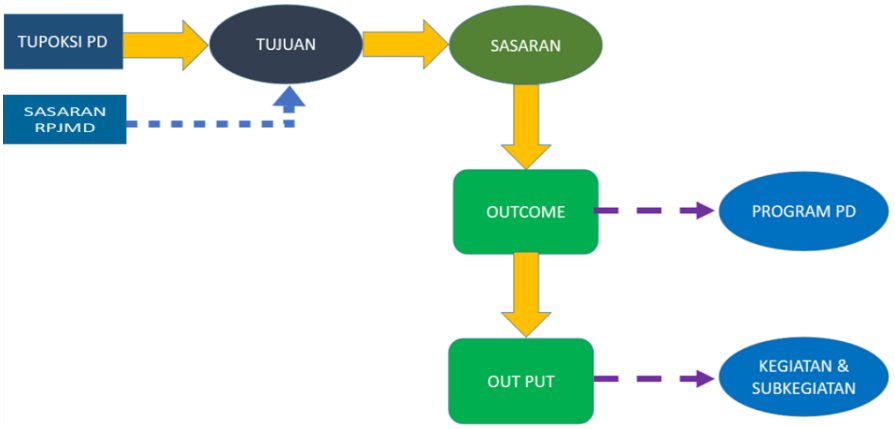
Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat daerah merupakan serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai hasil (outcome) suatu

program. Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran,outcome, dan output.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/

Subkegiatan Renstra PD



Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPUTARU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur konektivitas wilayah	**Meningkatnya kualitas pelayaanan insfrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan dalam rangka mendukung perekonomian daerah**				**Indeks Aksesibilitas Infrastruktur**		
		Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas			**Indeks Aksesibilitas Jalan**		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembangunan Jalan dan Jembatan					
			Meningkatnya Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota.		**Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	
				Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten	Peningkatan persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pergantian	Penggantian Jembatan	
				Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Terlaksananya Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun sampai perkerasan	Pembangunan Jalan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar	
				Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Rehabilitasi Jembatan	
				Jalan/Jembatan yang	Panjang jalan atau jembatan yang disurvey kondisinya	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				mendapatkan Survey Kondis			
				Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Rehabilitasi Jalan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Terlaksananya pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan jembatan	
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur konektivitas wilayah		**Meningkatnya Akses Layanan Dasar**			**Indeks Akses Layanan Dasar**		
			Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		**Persentase akses air minum aman**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (IUP)		
				Meningkatnya infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang terbangun, dikembangkan, atau ditingkatkan	**Persentase peningkatan SPAM jaringan perpipaan**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya Rencana,	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan,	Penyusunan Rencana, Kebijakan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jaringan Perpipaan			
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	jumlah Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Pembangunan Sarana Prasarana Persampahan Sesuai Standar		**Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	
				Meningkatnya sarana dan prasarana sistem pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota.	**Persentase Sarana dan Prasarana yang terbangun sesuai (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) standar**	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
				Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		**Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	
					Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah domestik	**Persentase Rumah tangga yang mengakses air limbah domestik**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
				Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
				Terbangunnya Instalasi	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis masyarakat yang dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
				Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
				Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik (SPALD) Desa	
			Meningkatnya panjang drainase dalam kondisi mantap		**Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Mantap**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Panjang Drainase yang terhubung langsung dengan sungai berfungsi Optimal	**Persentase Panjang Drainase yang terhubung langsung dengan sungai**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
				Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	
				Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
				Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
				Tersusunnya Rencana,	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Sistem Drainase Perkotaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
				Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	
Meningkatnya nilai investasi, penyerapan		**Meningkatnya Kinerja Pengelolaan**			**Indeks Kinerja Pengelolaan SDA Kabupaten**		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
tenaga kerja, kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian, ketahanan pangan		**Sumber Daya Air**					
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		**Persentase Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengendali Daya Rusak Air dalam kondisi Baik**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	
					Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten		
				Meningkatnya kondisi fungsional jaringan irigasi	**Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				dalam kondisi baik		**Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Yang Terkoordinasi, Sinkron dan Terlaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan			
				Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Diperkuat Kapasitasnya	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya pengelolaan SDA dan bangunan	**Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				pengaman Pantai dalam kondisi baik sesuai kewenangan kabupaten		**(WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	Pembangunan Tanggul Sungai	
				Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater Yang Dibangun	Pembangunan Breakwater	
				Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai Yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Normalisasi / Restorasi Sungai	
				Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung Yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Embung	
				Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Disusun	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai Yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Bangunan Penampung Air Lainnya Yang Disusun	dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan Ketahanan Bencana Daerah.		**Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**			**Indeks Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang**		
			Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang		**Persentase Dokumen RDTR yang tersusun**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Kinerja Penerbitan dan Pengendalian PKKPR		
				Meningkatnya produk hukum rencana Tata Ruang (RTRW&RDTR)	**Persentase Dokumen RDTR yang Terintegrasi**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang Kab./Kota**	
				Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR	Penetapan RDTR Kab./Kota	
				Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kab/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kab./Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi			
				Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jumlah Laporan Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang undangan bidang penataan ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksanakannya koordinasi & sinkronisasi perencanaan Tata Ruang dengan provinsi dan Pusat maupun wilayah yang berkaitan	**Persentase dokumen RDTR dan peta dasar yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab./Kota**	
				Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kab./kota	Penyusunan RDTR Kab./Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	
				Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP peta dasar	Penyusunan Peta Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya investasi dan kepeminatan investor masuk di Kab Rembang	**Persentase dokumen ITR dan PKKPR**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota**	
				Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	
				Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksanakannya pengawasan & pemanfaatan kesesuaian tata ruang	**Persentase Penilaian Pelaksanaan KKPR**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/ atau pernyataan mandiri pelaku UMK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan manfaat	
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur konektivitas wilayah		**Meningkatnya Kualitas hasil penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta layanan jasa konstruksi**			**Indeks Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi**		
			Meningkatnya kesesuaian		**Persentase Kesesuaian**	**PROGRAM PENATAAN**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			penataan bangunan gedung dengan peraturan yang berlaku		**Penataan Bangunan Gedung**	**BANGUNAN GEDUNG**	
				Terlaksananya penerbitan dokumen teknis bangunan gedung sesuai ketentuan	**Persentase Dokumen Teknis Bangunan Gedung Yang Diterbitkan**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan strategis kabupaten/Kota	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
			Meningkatnya kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah		**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	
				Terselenggaraannya penataan bangunan dan lingkungan	**Jumlah dokumen penyelenggaraaan penataan bangunan dan lingkungan di daerah Kab/Kota**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana penataan kawasan	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi		**Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Difasilitasi Peningkatan Kapasitas**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	
				Terselenggaranya pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah Kegiatan pelatihan dan/atau sertifikasi**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
				Tersedianya Homepage dan/atau subdomain SIPJAKI Daerah Termutakhir	**Jumlah Homepage dan/atau subdomain SIPJAKI Daerah Termutakhir**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang memenuhi ketentuan tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	**Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang memenuhi ketentuan tertib usaha,tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	
				Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyelenggaraan			
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis		**Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah**			**Nilai SAKIP DPUTARU**		
					Indeks Kepuasan Masyarakat DPUTARU		
					Indeks Manajemen Resiko DPUTARU		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah		**Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik	**Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perangkat Daerah			
				Tersampaikannya dokumen laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu	**Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersampaikannya laporan penatausahaan BMD perangkat daerah tepat waktu	**Persentase dokumen laporan Penatausahaan BMD yang disampaikan tepat waktu**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksanany a layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	**Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya pelayanan umum perangkat daerah	**Persentase pemenuhan pelayanan umum**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	**Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terkelolanya BMD dengan baik	**Persentase BMD dengan kondisi Baik**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang disusun untuk periode 2025-2030. Pencatuman program hingga tahun 2030 dimaksudkan untuk memastikan keberlanjutan arah perencanaan,sehingga rumusan kebijakan disusun dapat menjadi dasar yang konsisten bagi penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Program, Kegiatan, Sub kegiatan selama kurun waktu tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Fokus Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub kegiatan

   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan

- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

Sub Kegiatan

- Penggantian jembatan
- Pemeliharan Rutin Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Pemeliharaan Berkala Jalan
- Pelebaran Jalan Menuju Standar
- Rehabilitasi Jembatan
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- Rehabilitasi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pembangunan Jembatan

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Fokus kegiatan adalah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.

Kegiatan **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan

- Pembangunan Tanggul Sungai
- Pembangunan Breakwater
- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
- Operasi dan Pemeliharaan Sungai
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
- Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
- Normalisasi / Restorasi Sungai Rehabilitasi Embung
- Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Kegiatan **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan

- Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS
- Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Minum

Fokus kegiatan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan

- Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
- Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah

Fokus kegiatan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah.

Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan

- Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Penyediaan Unit Pengolahan Setempat
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa

7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase

Fokus kegiatan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah

Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan

- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
- Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan

- Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
- Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
- Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan

8. Program Penyelenggaraan Tata Ruang

Fokus kegiatan adalah Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota; Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan

- Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
- Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
- Pelaksaan Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang

Kegiatan **Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan

- Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
- Peningkatan kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang
- Penyusunan Peta Dasar

Kegiatan **Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
- Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan

- Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
- Pengawasan Turbilank dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat

9. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Kegiatan **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**

Sub kegiatan

- Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

10. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan

- Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab/Kota

11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus kegiatan adalah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (NonKecil dan Kecil); Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Sub Kegiatan:

- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Sub Kegiatan

- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak), sedangkan Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

Masing-masing program, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan diukur keberhasilannya mendasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Rencana Program/Kegiatan/ Sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2026-2030 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang														
Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota					11,400,000,000		11,870,000,000		12,170,000,000		13,631,000,000		14,722,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		80,000,000	
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	60		62		64		66		68		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		20,000,000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		2		2		2		3		
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		20,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	4		4		4		4		4		
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		20,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		10,000,000	
Terlaksanaanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	5		**5**		5		**5**		**5**		
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	-	-		1		1		1		1		1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**10,683,000,000**		**11,076,000,000**		**11,338,000,000**		**12,758,000,000**		**13,660,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersampaikannya dokumen laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu	**Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN					10,313,000,000		10,706,000,000		10,968,000,000		12,388,000,000		13,260,000,000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang	105	207		207		207		207		207		
Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					370,000,000		370,000,000		370,000,000		370,000,000	1	400,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	11	12		**12**		**12**		**12**		**12**		
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					**30,000,000**		**30,000,000**		**30,000,000**		**30,000,000**		**35,000,000**	
Tersampaikannya laporan penatausahaan BMD perangkat daerah tepat waktu	**Persentase dokumen laporan Penatausahaan BMD yang disampai**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	kan tepat waktu													
Koordinasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		35,000,000	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3,000,000		5,500,000		106,000,000		106,000,000		107,000,000	
Terlasananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Persentase	Na	100		100		100		100		100		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					3,000,000		5,500,000		6,000,000		6,000,000		7,000,000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Na	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									1,000,000,000		100,000,000		100,000,000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	Na					50		50		50		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					229.000.000		249.000.000		275.000.000		293.000.000		359.000.000	
Terpenuhinya pelayanan umum perangkat daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10,000,000		10,000,000		12,000,000		14,000,000		15,000,000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor					10,000,000		10,000,000		12,000,000		15,000,000		20,000,000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					30,000,000		30,000,000		32,000,000		35,000,000		50,000,000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan					35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		50,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Barang Cetakan Dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan					4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang disediakan	Dokumen	24	24		24		24		24		24		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Bahan/Material					40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		50,000,000	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	Paket	1	1		1		1		1		1		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD					80,000,000		100,000,000		120,000,000		130,000,000		150,000,000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	43	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							**24,200,000**		**50,000,0000**		**75,000,000**		**100,000,000**	
Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Prosentase	100			100		100		100		100		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							**24,200,000**		**50,000,000**		**75,000,000**		**100,000,000**	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Na			2		5		6		8		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**183,000,000**		**193,000,000**		**200,000,000**		**208,000,000**		**218,000,000**	
Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik					170,000,000		180,000,000		185,000,000		190,000,000		195,000,000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12		12		12		12		12		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor					10,000,000		10,000,000		12,000,000		15,000,000		20,000,000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Laporan	1	12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**235,000,000**		**282,000,000**		**287,000,000**		**302,000,000**		**370,000,000**	
Terkelolanya BMD dengan baik	**Persentase BMD Dengan Kondisi Baik**	**Persen**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Penyediaan Jasa					100,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		150,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	38	39		39		39		39		39		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Besar					100,000,000		120,000,000		120,000,000		130,000,000		150,000,000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang Dipeliharaa Dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	22	17		17		17		17		17		
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya					10,000,000		12,000,000		15,000,000		17,000,000		20,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	20	30		30		35		35		35		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya					25,000,000		30,000,000		32,000,000		35,000,000		50,000,000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3		3		3		3		3		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					21,600,000,000		30,000,000,000		31,000,000,000		18,000,000,000		18,500,000,000	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur SDA Dan Bangunan Pengendali Daya Rusak Air Kondisi Baik	Persen	62.13	67.04		71.35		79		83		92.7		
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	53	53.6		53.9		54.2		54.48		55.78		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					9,820,000,000		3,600,000,000		4,000,000,000		9,100,000,000		9,700,000,000	
Meningkatnya kondisi fungsional jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	39,62	32,64		44,33		51,78		52,73		57,22		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					8,000,000,000		1,750,000,000		1,900,000,000		7,000,000,000		7,500,000,000	
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi	Km	0.45	1.2		2.7		3		8.75		9		
Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					1,670,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Km	0,41	1.68		1.5		1.5		1.5		1.5		
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan							250,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	
Meningkatnya jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	NA			0.2		0.5		0.5		0.5		
Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi					100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Yang Terkoordinasi, Sinkron Dan Terlaksanakan	Rekomendasi	1	3		3		3		3		3		
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota					50,000,000								100,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Penguatan kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	NA	2								5		
Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					**11,780,000,000**		**26,400,000,000**		**27,000,000,000**		**8,900,000,000**		**8,800,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya pengelolaan SDA dan bangunan pengaman Pantai dalam kondisi baik sesuai kewenangan kabupaten	**Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai**	**Persen**	**22,51**	**24,87**		**27,01**		**27,23**		**31,26**		**35,53**		
Pembangunan Tanggul Sungai					3,000,000,000		1,000,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		2,500,000,000	
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	Km	0.63	1.275		0.5		1		0.88		1.5		
Pembangunan Breakwater											5.050.000.000		1,000,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater Yang Dibangun	Km	0.07							0.22		0.25		
Pembangunan Embung Dan Penampung Air Lainnya					5,400,000,000		24,000,000,000		23,000,000,000				1,550,000,000	
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung Dan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun	Unit	NA	2		1		1				1		
Operasi Dan Pemeliharaan Sungai					500,000,000		400,000,000						1.800.,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Km	NA	4.8		0.24						1		
Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sda Kewenangan Kabupaten/ Kota					30,000,000									

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sda Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dibina Dan Diberdaya kan	Lembaga	NA	5										
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	NA	5		5		5		5		5		5
Operasi Dan Pemeliharaan Embung Dan Penampung Air Lainnya							300,000,000							

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beroperasi dan Terpelihara nya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung Dan Penampu ng Air Lainnya Yang Dioperasi kan Dan Dipelihar a	Unit	NA			3								
Normalisasi / Restorasi Sungai					500.000.000		550.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000	
Terlaksanan ya Normalisasi /Restorasi Sungai	Panjang Sungai Yang Dinormali sasi/Dires torasi	Km	1.88	2,88		4,33		5,78		7,23		8,68		
Rehabilitasi Embung					400.000.000		250.000.000		1.000.000.000		500.000.000		500.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung Yang Direhabilitasi	Unit	Na	5		3		10		5		5		
Penyusunan Pola Dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pola Dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Disusun				100,000,000								500,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pola Dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Disusun	Dokumen	NA	1								6		
Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar Dan Pengaman Pantai					600,000,000									

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar Dan Pengaman Pantai Yang Disusun	Dokumen	NA	2										
Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah Dan Air Baku					450,000,000									

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah Dan Air Baku Yang Disusun	Dokumen	NA	1										
Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya					600,000,000						400,000,000			

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Yang Disusun	Dokumen	NA	3						1				

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					3,100,000,000		4,200,000,000		4,400,000,000		4,600,000,000		4,800,000,000	
Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Akses Air Minum Aman	Persen	30.66	37.76		41.31		44.86		48.41		51.96		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	12.63	15.57		17.05		18.52		20		21.5		
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/ Kota					3,100,000,000		4,200,000,000		4,400,000,000		4,600,000,000		4,800,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang terbangun, dikembangkan, atau ditingkatkan	Persentase peningkatan SPAM jaringan perpipaan	Persen	25,81	26,42		29,99		33,84		37,69		41,64		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					75,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Yang Disusun	Dokumen	NA	1		3		3		3		3		
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,100,000,000		1,150,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Yang Ditingkatkan	Liter/Detik	NA	2		2		2		2		2		
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,100,000,000		1,150,000,000	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Yang Dibangun	Liter/ Detik	10	2		2		2		2,5		2,5		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	NA	1		1		1		1		1		
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					775,000,000		1,650,000,000		1,850,000,000		1,850,000,000		1,950,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani Oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	NA	155		320		360		360		380		
Pembinaan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa					50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa Yang Dibina Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	NA	60		60		60		60		60		
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional					**50,000,000**		**60,000,000**		**70,000,000**		**80,000,000**		**90,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Pembangunan Sarana Prasarana Persampahan Sesuai Standar	Persentase Terbangunnya Sarana Prasarana Persampahan Sesuai Standar	Persen	35	45.71		52.34		59.71		68.24		77.99		
Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/ Kota					50,000,000		60,000,000		70,000,000		80,000,000		90,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya sarana dan prasarana sistem pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/ kota.	**Persentase Sarana dan Prasarana yang terbangun sesuai (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) standar**	**Persen**	**38,58**	**40**		**42**		**44**		**46**		**48**		
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS									20,000,000		20,000,000		20,000,000	
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Yang Dioptimalisasi	Unit	NA					1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					50,000,000		60,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000	
Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Yang Disediakan	Unit	NA	1		1		1		1		1		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					**6,700,000,000**		**5,000,000,000**		**5,100,000,000**		**5,150,000,000**		**5,200,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	96.67	98.2		98.39		98.59		98.79		100		
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Unit	1.06	5.77		10.48		15.19		19.9		24.61		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota					6,700,000,000		5,000,000,000		5,100,000,000		5,150,000,000		5,200,000,000	
Terbangunny a instalasi pengolahan air limbah domestik	**Persentase Rumah tangga yang mengakses air limbah domestik**	**Persen**	92,71	93,01		93,61		93,91		94,21		94,51		
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					1,600,000,000		650,000,000		650,000,000				650,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Yang Dioptimalisasi	Unit	NA	1		1		1				1		
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					500,000,000		500,000,000		500,000,000				500,000,000	
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Yang Ditingkatkan	Mâ³/Hari	10	5		5		5				5		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)											2,500,000,000			
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Mâ³/Hari	10							10				
Pembangun a n Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat					500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terbangunny a Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelola a n Air Limbah Domestik (SPALD)T er pusat Skala Permuki m an Berbasis masyarak a t yang Dibangun	Mâ³/Hari	NA	5		5		5		5		5		
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	NA	500		500		500		500		500		
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja					1,300,000,000		1,300,000,000		1,300,000,000				1,300,000,000	
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Yang Disediakan	Unit	Na	2		2		2				2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		200,000,000	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Unit	1	10		10		10		10		10		
Penyediaan Unit pengolahan setempat					1,500,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	400	100		50		50		50		50		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					100,000,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Yang Disusun	Dokumen	NA	1		1		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa					50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		100,000,000	
Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Desa	Na	50		50		50		50		94		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase					**3,000,000,000**		**3,100,000,000**		**3,200,000,000**		**3,300,000,000**		**3,400,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya panjang drainase dalam kondisi mantap	Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Mantap	%	30	40.83		47.64		55.58		64.84		75.65		
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/ Kota					3,000,000,000		3,100,000,000		3,200,000,000		3,300,000,000		3,400,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Panjang Drainase yang terhubung langsung dengan sungai berfungsi Optimal	**Persentase Panjang Drainase yang terhubung langsung dengan sungai**	**%**	**Na**	**93,02**		**99,03**		**100**		**100**		**100**		
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan					500,000,000		600,000,000		600,000,000		700,000,000		600,000,000	
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan Yang Dibangun	Meter	1000	500		500		600		700		600		
Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan					300,000,000		350,000,000		350,000,000		400,000,000		400,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan Yang Beroperasi Dan Terpelihara	Meter	2400	6000		7000		7000		8000		8000		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan					100,000,000									

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Yang Disusun	Dokumen	NA	1										
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					500,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000	
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	NA	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Outline Plan Pada Kawasan Genangan					100,000,000								50,000,000	
Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan Yang Disusun Outline Plannya	Kawasan Genangan	NA	1								1		
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					500,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000	
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	NA	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					500,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000	
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	NA	2		2		2		2		2		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					100,000,000								50,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Yang Disusun	Dokumen	NA	1								1		
Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan					300,000,000		350,000,000		350,000,000		400,000,000		400,000,000	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Beroperasi Dan	Sistem Drainase Perkotaan	NA	22		22		22		22		22		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Terpelihara													
Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan					100,000,000				100,000,000				100,000,000	
Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Yang Disediakan	Unit	1	1				1				1		
Program Penataan Bangunan Gedung					7,000,000,000		6,000,000,000		5,500,000,000		6,000,000,000		7,500,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan gedung dengan peraturan yang berlaku	Persentase Kesesuaian Penataan Bangunan Gedung	%	100	100		100		100		100		100		
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					**7,000,000,000**		**6,000,000,000**		**5,500,000,000**		**6,000,000,000**		**7,500,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya penerbitan dokumen teknis bangunan gedung sesuai ketentuan	**Persentase Dokumen Teknis Bangunan Gedung Yang Diterbitkan**	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/ Kota					3,350,000,000		2,850,000,000		2,600,000,000		2,850,000,000		3,600,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	NA	100		100		100		100		100		
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota					3,350,000,000		2,850,000,000		2,600,000,000		2,850,000,000		3,600,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	10		10		10		10		10		
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),					300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKGB), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG														

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKGB), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),	Dokumen	105	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG													
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya					**4,700,000,000**		**9,825,000,000**		**4,915,000,000**		**5,015,000,000**		**5,110,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah	%	Na	16.67		33.33		50		66.67		100		
Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/ Kota					4,700,000,000		9,825,000,000		4,915,000,000		5,015,000,000		5,110,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan	**Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah Kab/kota**	**dokumen**	**Na**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		
Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Daerah Kabupaten/ Kota					4,700,000,000		9,825,000,000		4,915,000,000		5,015,000,000		5,110,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan rencana penataan kawasan	Jumlah Kawasan Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Kawasan	Na	10		10		10		10		10		
Program Penyelenggaraan Jalan					**39,053,808,998**		**48,500,000,000**		**50,000,000,000**		**52,000,000,000**		**53,000,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten /Kota.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	71.17	71.44		72.21		73.17		74.21		75.25		
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota					39,053,808,998		48,500,000,000		50,000,000,000		52,000,000,000		53,000,000,000	
Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten	Peningkat an Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Poin Persentase	0,2	0,27		0,77		0,96		1,04		1,04		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penggantian Jembatan					500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dilakukan Pergantian	M	4	8		8		8		8		8		
Pemeliharaan Rutin Jembatan					1,800,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	jembatan	Na	6		2		2		2		2		
Pembangunan Jalan					10.950,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun Sampai Perkerasan	Km	19.186	5		2.5		2.5		2.5		2.5		
Pemeliharaan Berkala Jalan					12,443,808,998		14,500,000,000		15,500,000,000		17,500,000,000		17,500,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Berkala	Km	NA	5		6,5		7		8		8		
Pelebaran Jalan Menuju Standar					0		10,000,000,000		10,500,000,000		10,500,000,000		10,500,000,000	
Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan Yang Dilebarkan Menuju Standar	Km	NA	0		2.5		2.63		2.63		2.63		
Rehabilitasi Jembatan					0		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan Yang Direhabilitasi	M	NA	0		16		16		16		16		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Survey Kondisi Jalan/Jembatan					300,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondis	Panjang Jalan Atau Jembatan Yang Disurvey Kondisinya	Km	594.199	594.199		594.199		594.199		594.199		594.199		
Rehabilitasi Jalan					1,400,000,000		6,000,000,000		6,000,000,000		6,000,000,000		6,000,000,000	
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Direhabilitasi	Km	2,546	1		4,8		4.8		4.8		4.8		
Pemeliharaan Rutin Jalan					10,200,000,000		9,500,000,000		9,500,000,000		9,500,000,000		10,500,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Rutin	Km	63	70		65		65		65		65		
Pembangunan Jembatan					1,460,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	M	Na	8		6		6		6		6		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi					**300,000,000**		**285,000,000**		**305,000,000**		**315,000,000**		**330,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi	**Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Yang Difasilitasi Peningkatan Kapasitas**	**%**	**Na**	**33.33**		**50**		**66.67**		**83.33**		**100**		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					70,000,000		50,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	
Terselenggaranya pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah Kegiatan pelatihan dan/atau sertifikasi**	**Kegiatan**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**2**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi					70,000,000		50,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000	
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	**jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya**	**Lembaga**	**Na**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota					30,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		30,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Homepage dan/atau subdomain SIPJAKI Daerah Termutakhir	**Jumlah Homepage dan/atau subdomain SIPJAKI Daerah Termutakhir**	**Subdomain**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota					30,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		30,000,000	
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	Na	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					200,000,000		210,000,000		220,000,000		230,000,000		240,000,000	
Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang memenuhi ketentuan tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi yang memenuhi ketentuan tertib usaha,tertib penyelenggaraan dan tertib	%	Na	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	pemanfaatan jasa konstruksi													
Pengawasan Dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota					200,000,000		210,000,000		220,000,000		230,000,000		240,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Yang Diawasi Dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket	Na	30		30		30		30		30		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					**750,000,000**		**800,000,000**		**850,000,000**		**900,000,000**		**950,000,000**	
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang)	**Persentase Dokumen RDTR Yang Tersusun**	**%**	**20**	**20**		**40**		**60**		**80**		**100**		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Kinerja Penerbitan Dan Pengendalian PKKPR	%	70	72		75		80		83		85		
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang Kab./Kota					200,000,000		210,000,000		220,000,000		230,000,000		240,000,000	
Meningkatnya produk hukum Rencana Tata Ruang (RTRW & RDTR)	Persentase Dokumen RDTR yang Terintegrasi	Persen	NA	-		25		25		50		50		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penetapan RDTR Kab./Kota					75,000,000		85,000,000		40,000,000		95,000,000		95,000,000	
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkada RDTR	Dokumen	1	1		2		3		5		7		
Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota									300,000,000					
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Na					1						
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kab./Kota					100,000,000		100,000,000		100,000,000		110,000,000		120,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kab/Kota	Dokumen	1	2		3		4		5		7		
Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					25,000,000		25,000,000		-		25,000,000		25,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang	Laporan	NA	1		1		1		1		1		
Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab./Kota					**200,000,000**		**210,000,000**		**220,000,000**		**230,000,000**		**240,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksanakannya koordinasi & sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan provinsi dan pusat maupun wilayah yang berkaitan	**Persentase dokumen RDTR dan peta dasar yang dikoordinasikan dan disinkronisasikan**	**Persen**	**25**	**50**		**50**		**75**		**75**		**100**		
Penyusunan RDTR Kab./Kota					100,000,000		110,000,000		-		125,000,000		130,000,000	
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah Materi Teknis Dan Ranperkada RDTR Kab./Kota	Dokumen	1	2		3		4		6		8		
Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang					25,000,000		25,000,000		-	-	-	-	-	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	0	13		13		13						
Penyusunan Peta Dasar					75,000,000		75,000,000		-		105,000,000		110,000,000	
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar	Peta	2	3		4		5		6		8		
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota					**200,000,000**		**220,000,000**		**240,000,000**		**260,000,000**		**280,000,000**	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Investasi dan Kepeminatan Investor masuk di Kab Rembang	**Persentase Dokumen Itr Dan PKKPR**	**Persen**	**97**	**99**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					100,000,000		100,000,000		100,000,000		120,000,000		135,000,000	
Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR Sesuai Dengan Ketentuan Waktu Yang Berlaku	Layanan	1	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
waktu yang berlaku yaitu 20 hari														
Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang					75,000,000		95,000,000		115,000,000		115,000,000		120,000,000	
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang	Dokumen	NA	1		1		1		1		1		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang					25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Terlaksanannya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Laporan	0	6		6		6		6		6		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota					150,000,000		160,000,000		170,000,000		180,000,000		190,000,000	
Terlaksanakannya pengawasan pemanfaatan & kesesuaian tata ruang	Persentase Penilaian Pelaksana an KKPR	Persen	NA	50		55		60		65		70		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan/Atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK														
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen Tekstual Dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	Na	2		2		2		2		2		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Dan Pagu										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengawasan Turbinlak Dan Pengawasan Fungsi Dan Manfaat					150,000,000		160,000,000		170,000,000		180,000,000		190,000,000	
Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen Hasil Peniliaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan Dan Pelaksanaan Penataan Ruang Dan Penilaian Kinerja Fungsi Dan Manfaat	Dokumen	1	1		1		1		1		1		

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak pada pertumbuhan investasi serta konektivitas wilayah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Rembang dalam beberapa tahun ke depan. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi baru yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis akan dilakukan untuk memastikan infrastruktur yang tersedia mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara optimal. Salah satu fokus utama dalam pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas dan ketersediaan jalan, jembatan, irigasi, serta drainase yang menjadi kewenangan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus melakukan perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan guna meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, terutama di daerah yang masih terisolasi. Selain itu, perbaikan sistem irigasi akan menjadi perhatian utama untuk mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sistem drainase yang baik juga akan terus dikembangkan guna mengurangi risiko banjir, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.

Program Prioritas merupakan program strategis yang dirancang dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang. Program ini ditetapkan melalui proses perencanaan yang sistematis dan berbasis pada pendekatan cascading kinerja, yakni penurunan target dari tingkat tujuan dan sasaran daerah ke dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat diukur dan dievaluasi. Dengan pendekatan ini, setiap program prioritas memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian indikator kinerja utama daerah. Penetapan program prioritas juga mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, kebutuhan masyarakat, kapasitas fiskal, dan potensi sumber daya daerah, sehingga implementasinya bersifat fokus, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program prioritas dirancang untuk mendorong sinergi antarsektor dan antarwilayah dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, serta berbasis data dan bukti (evidence-based planning). Dengan demikian, pelaksanaan program prioritas menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi “Rembang

Sejahtera" secara bertahap dan terarah selama periode RPJMD. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Minum, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas sebagai berikut:

1. Penggantian Jembatan
2. Pemeliharaan Rutin Jembatan
3. Pembangunan Jalan
4. Pemeliharaan Berkala Jalan
5. Pelebaran Jalan Menuju Standar
6. Rehabilitasi Jembatan
7. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan
8. Rehabilitasi Jalan
9. Pemeliharaan Rutin Jalan
10. Pembangunan Jembatan
11. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
12. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
13. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
14. Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
15. Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
16. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
17. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
18. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
19. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
20. Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
21. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

22. Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
23. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
24. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
25. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
26. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
27. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
28. Penyediaan Unit Pengolahan Setempat
29. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
30. Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis System Penyediaan Air Minum (SPAM)
31. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
32. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
33. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
34. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
35. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
36. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
37. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
38. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
39. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
40. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
41. Pembangunan Tanggul Sungai
42. Pembangunan Breakwater
43. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
44. Operasi dan Pemeliharaan Sungai
45. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

46. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
47. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
48. Normalisasi/Restorasi Sungai
49. Rehabilitasi Embung
50. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
51. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai
52. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
53. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
54. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS
55. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
56. Penetapan RDTR Kab./Kota
57. Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
58. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kab./Kota
59. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
60. Penyusunan RDTR Kab./Kota
61. Peningkatan kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang
62. Penyusunan Peta Dasar
63. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
64. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
65. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
66. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
67. Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan manfaat
68. Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

Daftar sub kegiatan prioritas yang mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
1	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Meningkatnya Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	
			Penggantian Jembatan	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			Pembangunan Jalan	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			Rehabilitasi Jembatan	
			Survey Kondisi Jalan Jembatan	
			Rehabilitasi Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Pembangunan Jembatan	
2	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Meningkatnya panjang drainase dalam kondisi mantap**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
			Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
			Penyusunan Outline Plan Pada Kawasan Genangan	
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	
			Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	
3	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Meningkatnya pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
			Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	
4	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM)	
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Pembinaan Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) desa	
5	**Program Pengembangan Sumber Daya Air (SDA)**	**Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan Tanggul Sungai	
			Pembangunan Breakwater	
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
			Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
			Normalisasi/Restorasi Sungai	
			Rehabilitasi Embung	
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Banjir	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kontsruksi Bendungan, embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
6	**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**Meningkatnya Pembangunan Sarana Prasarana Persampahan Sesuai Standar**	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	
			Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
7	**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**	**Meningkatnya kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah**	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
8	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang Kab./Kota**	
			Penetapan RDTR Kab./Kota	
			Penetapan RTRW Kab/Kota	
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kab./Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab./Kota	
			Penyusunan RDTR Kab./Kota	
			Peningkatan kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	
			Penyusunan Peta Dasar	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
			Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	
			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
			Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan manfaat	

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
DPUTARU Kab Rembang

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	angka	70,44	56,28	61,07	66,65	71,78	78,62	
2	Indeks Aksesibilitas Jalan	angka	0,4083	0,4091	0,4136	0,4191	0,4250		
3	Indeks Akses Layanan Dasar	angka	37,30	41,30	45,90	50,97	56,66	63,17	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan SDA Kabupaten	angka	58,95	60,32	62,63	66,60	68,74		
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	angka	45	46	57,5	70	81,5	92,5	
6	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan serta layanan jasa konstruksi	angka	40	55	65	75	85	100	
7	Nilai SAKIP DPUTARU	angka	72,72	64,95	64,96	64,97	64,98	64,99	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat DPUTARU	angka	83,69	78	78,05	78,1	78,15	78,2	
9	Indeks Manajemen Risiko DPUTARU	angka	Na	2,705	2,7850	2,868	2,953	3,040	

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Kinerja penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut:

Tabel 4.5
Dukungan terhadap Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Infrastruktur	angka	66,23	67,71	70,31	73,08	76,06	79,26	

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Indeks Infrastruktur Konektivitas Wilayah	angka	64,39	65,32	68,18	71,17	74,24	77,36	
3	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (IUP 46)	%	72,00	73,00	74,15	75,60	77,20	79,00	
4	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (IUP 47)	%	37,17	37,69	38,22	38,74	39,27	39,79	
5	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (IUP 51)	%	14,03	15,57	17,05	18,52	20,00	21,50	
6	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten (IUP 52)	Angka	53,00	53,60	53,90	54,20	54,48	55,78	

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Kinerja penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Kunci (IKK) berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030, IKK mendasarkan pada Permendagri 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang disampaikan melalui tabel berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
DPUTARU Kab Rembang

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	50,62	55,32	60,02	64,72	69,42	74,12	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	Persen	8,85	12,35	15,85	19,35	22,85	26,35	
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	37,25	39,75	42,25	44,75	47,25	49,75	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan rumah tangga di seluruh Kota bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Persen	93,76	94,68	95,6	96,52	97,44	98,36	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan	Persen	92,87	93,03	93,19	93,35	93,51	93,67	

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pengolahan air limbah domestik								
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	73,47	75,77	78,07	80,37	82,67	84,97	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	8,95	13,95	18,95	23,95	28,95	33,95	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam periode 5 (lima) tahun mendatang akan berusaha lebih baik lagi dalam rangka peningkatan penyerapan anggaran dana yang tersedia dengan memperbaiki faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menunjang pembangunan daerah untuk Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dalam mendukung investasi dan aktivitas masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Tahun 2025-2029 menyesuaikan RPJMD Kabupaten Rembang, dan RPJMN terutama yang relevan dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 ini sebagian memuat program kerja periode pemerintahan sebelumnya. Seperti yang kita pahami bahwa Rencana Strategis ini merupakan penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029) 5 (lima) tahun yang akan datang sesuai sasaran, strategi serta program/kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya Renstra ini akan menjadi Dokumen Perencanaan dan acuan kerja bagi seluruh jajaran Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai Renstra Tahun 2025-2029 ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun-tahun mendatang.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan Renstra merupakan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, oleh karena itu dalam implementasinya konsistensi, kerja sama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target dalam Renstra Tahun 2025-2029. Dalam rangka implementasi Renstra Tahun 2025-2029 kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang 2025- 2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
b. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD tahun 2025 – 2029 dengan
c. Renstra Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 memungkinkan untuk diubah dengan ketentuan: 1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan kondisi tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat monitoring dan evaluasi dilaksanakan; 2) Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat dilaksanakan Montororing dan evaluasi; dan 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi perubahan kebijakan nasional);
d. Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
e. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rembang setiap tahun mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang setiap tahun mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Untuk menjamin tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengendalian risiko strategis pemerintah daerah yang kontinu dan partisipatif untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti
b. Untuk mengetahui pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah dan target-target kinerja Renstra, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berkewajiban melakukan evaluasi terhadap hasil Renstra minimal 1 kali dalam lima tahun.

Pedoman Transisi Sebagai pedoman transisi, pada saat Renstra Kabupaten Rembang Tahun 2030–2035 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan hukum, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2030, sekaligus menjadi target kinerja pembangunan transisi Tahun 2030 pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya.

Permasalahan pembangunan insfrastruktur sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan pada semua unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang serta perlu adanya komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, swasta dan masyarakat. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasil guna.

5.3 Pedoman Transisi

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan Ranwal Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Tahun 2025-2029 dan memberikan kontribusi kepada pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Rembang, apabila dipenuhinya target dan pendanaan yang sesuai dengan program/kegiatan yang termuat dalam renstra ini. Semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Rembang, 20 Oktober 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang



MARYOSA, ATD.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP 19671211 199003 1 007